

Prof. Dr. As'ad, M.Pd
Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
M. Husnul Abid, MA



MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA MODERAT

Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan
Multikulturalisme dan Moderasi Beragama



Editor
Dr. Firmansyah, MA
Arfan Aziz, Ph.D

Prof. Dr. As'ad, M.Pd
Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
M. Husnul Abid, MA

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA MODERAT

Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan
Multikulturalisme dan Moderasi Beragama

Editor
Dr. Firmansyah, MA
Arfan Aziz, Ph.D



MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA MODERAT
Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan Multikulturalisme dan Moderasi Beragama

Penulis : Prof. Dr. As'ad, M.Pd
Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
M. Husnul Abid, MA

ISBN : 978-623-329-630-4

Copyright © Januari 2021

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xviii + 102

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor : Dr. Firmansyah, MA
Arfan Aziz, Ph.D

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Januari 2022

Cetakan 2, Agustus 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



KATA PENGANTAR

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat-Nya buku karya Prof. Dr. As'ad, M.Pd yang ada di tangan para pembaca ini bisa terbit. Shalawat dan salam disanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan bagi umatnya untuk senantiasa memberi kemaslahatan bagi sesama.

Buku berjudul, “Membangun Sumber Daya Manusia Moderat: Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan Multikulturalisme dan Moderasi Beragama” merupakan hasil penelitian lapangan Prof. Dr. As'ad, M.Pd dan tim yang dikerjakan di Ambon, Salatiga, Manado, dan Solo. Peneliti fokus membahas bagaimana perguruan tinggi Islam berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia yang moderat.

Secara historis sangat jelas bahwa perguruan tinggi Islam telah memberikan sumbangan besar untuk mempersiapkan generasi muda Islam yang profesional sekaligus memiliki komitmen kebangsaan, dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks inilah, kehadiran buku hasil riset Prof. Dr. As'ad, M.Pd ini sangat penting untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali bahwa mempersiapkan sarjana profesional yang Islami dan nasionalis tidak akan pernah terhenti, melainkan akan semakin diarusutamakan.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian akademis terutama yang membahas tentang pendidikan

multikultural dan kajian moderasi beragama, khususnya di perguruan tinggi agama. Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan kekuatan kepada kita, amin.

Jakarta, Agustus 2023

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, MT



KATA PENGANTAR

GUBERNUR PROVINSI JAMBI

Puji syukur kepada Allah Swt, atas terbitnya buku karya Prof. Dr. As'ad, M.Pd, “Membangun Sumber Daya Manusia Moderat: Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan Multikulturalisme dan Moderasi Beragama.”

Lembaga pendidikan merupakan tempat persemaian generasi muda Indonesia yang profesional dan memiliki komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia perlu dipahami dan diresapi oleh setiap warga negara melalui proses pendidikan. Maka, pengelola lembaga pendidikan perlu menjamin bahwa nilai-nilai: inklusif, saling menghargai, komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan, dan menghargai tradisi ada dan berlangsung dalam proses pendidikan.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. As'ad, M.Pd dan tim ini sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan multikultural dan implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan harus terus diurus utamakan untuk dapat mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saya berharap buku dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki perspektif multikultural dan moderasi beragama, khususnya di Provinsi Jambi.

Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada Prof. Dr. As'ad, M.Pd dan tim penulis atas terbitnya buku ini.

Jambi, 29 Juli 2023

Gubernur Provinsi Jambi

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H



PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum wr, wb

Alhamdulillah *rabbi'lalamin*, segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, iman dan ilmu pengetahuan kepada para penulis. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia yang dilimpahi cahaya ilmu dan pengetahuan.

Buku referensi, “Membangun Sumber Daya Manusia Moderat: Peran Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam Pengarusutamaan Multikulturalisme dan Moderasi Beragama” ini merupakan hasil penelitian yang penulis kerjakan di tiga pulau, yaitu: Jawa, Sulawesi, dan Ambon. Di pulau Jawa lokasi penelitian berada di UIN Raden Mas Said, dan IAIN Salatiga. Di Sulawesi, peneliti mengambil lokasi penelitian di IAIN Manado. Sedangkan di Pulau Ambon, penelitian dilakukan di IAIN Ambon.

Setiap pemilihan lokasi penelitian, penulis memiliki argumentasi masing-masing. Pemilihan UIN Raden Mas Said di Solo karena daerah Solo merupakan sebuah daerah yang sangat jelas dengan adanya gerakan kalangan Islamis yang massif dan berkelanjutan. Sementara di kampus IAIN Salatiga, bahwa daerah Salatiga dalam catatan Setara (2020) merupakan sebuah daerah yang memiliki indeks toleransi yang tinggi.

Sementara lokasi penelitian di IAIN Manado, bahwa daerah Manado merupakan kota yang memiliki indek toleransi yang tinggi (Setara, 2020). Sedangkan pemilihan IAIN Ambon, merupakan daerah yang pernah mengalami sebuah konflik antar umat beragama yaitu Islam dan Kristen. Pada saat konflik Ambon terdapat banyak korban yang meninggal. Maka dapat dikatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian tidak terlepas dari identifikasi dari sebuah daerah yang memiliki indeks toleransi, dan tingkat konflik keagamaan yang tinggi.

Buku referensi yang sedang berada di tangan para pembaca ini memiliki keunikan dan kebaruan, karena memiliki perspektif dan mengaitkannya dengan isu sumber daya manusia. Tesis yang penulis bangun, bahwa perguruan tinggi Islam memiliki kontribusi dalam mempersiapkan para alumni yang akan berkarir di masyarakat di berbagai profesi dan pekerjaan. Para alumni perguruan tinggi Islam ini, nantinya tidak hanya bekerja, namun juga dapat menjalankan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip multikulturalisme dan moderasi beragama.

Dalam buku ini penulis mengulas, bagaimanaa peran perguruan tinggi Islam yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia moderat dan profesional belum dapat dilakukan secara optimal. Implementasi pendidikan multikultural dan pelaksanaan program moderasi beragama belum berlangsung secara memuaskan. Oleh sebab itu penulis menilai sangat penting untuk mempelajari apa saja persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam dalam menyelesaikan kendala tersebut.

Di buku ini, penulis memilih penyajian dengan bentuk sebuah laporan penelitian. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat melihat secara jelas dan otentik bagaimana proses buku ini ditulis. Pembaca akan dapat melihat metode penelitian yang digunakan, dan bagaimana pelaksanaan dan dinamika selama penelitian di lapangan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph.D, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dipimpin oleh Dr. Ayub Mursalin, MA yang telah membantu pendanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselenggarakan hingga dapat didiseminasi dalam bentuk buku referensi ini.

Penulis menyadari, buku referensi berdasarkan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran agar dapat menjadi bahan bagi penulis untuk melakukan perbaikan di edisi revisi.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga buku ini dapat memberikan kontribusi mengenai bagaimana mengoptimalkan peran perguruan tinggi Islam negeri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki pandangan moderat, pluralis serta inklusif.

Wassalamualaikum wr, wb

Jambi, Januari 2022

Penulis





PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillahirabbilalamin. Editor mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah dapat menyelesaikan proses edit buku referensi, “Membangun Sumber Daya Manusia Moderat: Peran Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam Pengarusutamaan Multikulturalisme dan Moderasi Beragama” yang dikerjakan oleh D.r. As’ad, M.Pd, Dr. Fridiyanto, M.Pd.I, dan M. Husnul Abid, MA.

Buku referensi yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini merupakan sebuah buku penting untuk melihat bagaimana kontribusi perguruan tinggi Islam dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang moderat. Persoalan intoleransi dan ekstrimisme beragama masih menjadi persoalan di masyarakat Indonesia.

Saat ini di Indonesia sedang menghadapi banyak persoalan konflik yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kondisi intoleran semakin meningkat, konflik sektarian dan keagamaan sangat tinggi, sehingga diperlukan solusi komprehensif salah satunya adalah melalui proses pendidikan di perguruan tinggi Islam. maka, sangat tepat jika para penulis memilih kata di dalam judulnya “pengarusutamaan” multikulturalisme dan moderasi beragama.

Perguruan tinggi Islam yang menyebar di seluruh Indonesia merupakan modal sosial dan kultural. Sehingga kerja-kerja akademik yang dilakukan di perguruan tinggi Islam sangat penting dalam diseminasi sumber daya manusia profesional namun di sisi lain juga memiliki pandangan yang moderat dan bersikap inklusif. Buku ini memberi tawaran baru bagi kajian sumber daya manusia yang

mengintegrasikannya dengan kajian multikulturalisme dan moderasi beragama.

Akhirnya, editor mengucapkan selamat membaca. Semoga buku referensi berbasis penelitian ini dapat mewarnai kajian sumber daya manusia dengan perspektif baru.

Wassalamualaikum wr, wb

Medan dan Jambi, Januari, 2022

Editor



ABSTRAK

Argumentasi yang dibangun dalam buku ini bahwa, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri berperan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang moderat melalui pendidikan berbasis multikultural dan menjalankan program moderasi beragama. Pendidikan multikultural dan program moderasi beragama dapat membangun dialog antar agama, toleransi, serta mencegah konflik yang didasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multikasus. Penelitian dilaksanakan di UIN Mas Said Solo, IAIN Salatiga, IAIN Manado, dan IAIN Ambon. Data dikumpulkan melalui observasi, *focus group discussion*, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian bahwa perguruan tinggi Islam negeri berperan penting dalam pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama. Perguruan tinggi Islam merupakan sarana dalam mempersiapkan sumber daya manusia moderat. Namun dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi Islam belum secara optimal dalam menjalankan pendidikan multikultural dan program moderasi beragama. Masih terdapat pandangan dan sikap eksklusivisme kalangan perguruan tinggi Islam. Kerjasama dengan lembaga dan perguruan tinggi non Islam belum dilakukan secara optimal. Rekomendasi penelitian ini bahwa perguruan tinggi Islam perlu memperkuat visi dan implementasi pendidikan multikultural dan menjalankan program moderasi beragama. Perlu memperkuat kerjasama antar lembaga lintas iman dan agama untuk memperkuat dialog.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pendidikan Multikultural



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | |
| DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM | iii |
| KATA PENGANTAR GUBERNUR PROVINSI JAMBI | v |
| PENGANTAR PENULIS | vii |
| PENGANTAR EDITOR | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |

BAB 1

| | |
|--------------------------------|---|
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |

BAB 2

| | |
|---|----|
| KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi | 9 |
| 1. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural | 9 |
| 2. Pendidikan Multikultural: dari Teori ke Praktik | 13 |
| 3. Tantangan Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi | 16 |
| B. Moderasi Beragama dan Perguruan Tinggi | 19 |
| 1. Konsep dan Diskursus Moderasi Beragama | 19 |
| 2. Dinamika Moderasi Beragama | 22 |

| | |
|---|----|
| 3. Moderasi Beragama: Menagih Peran Perguruan Tinggi | 23 |
| C. Sumber Daya Manusia Moderat dan Peran Perguruan Tinggi Islam..... | 26 |
| 1. Mengelola Sumber Daya Manusia: Peran Perguruan Tinggi .. | 26 |
| 2. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Moderat dan Pluralis..... | 27 |
| 3. Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Membangun Sumber Daya Manusia Moderat..... | 31 |
| D. Studi Relevan..... | 34 |

BAB 3

| | |
|-------------------------|----|
| METODE PENELITIAN | 45 |
|-------------------------|----|

BAB 4

| | |
|---|----|
| TEMUAN DAN PEMBAHASAN..... | 49 |
| A. Temuan Penelitian | 49 |
| 1. Eksistensi PTKIN : Kondisi Multikultural dan Pertarungan Ideologi | 49 |
| 2. PTKIN, Sumber Daya Manusia Moderat dan Pluralis: Media dan Impementasi | 62 |
| 3. Tantangan Pendidikan Multikultural dan Program Moderasi Beragama..... | 69 |
| B. Pembahasan | 77 |

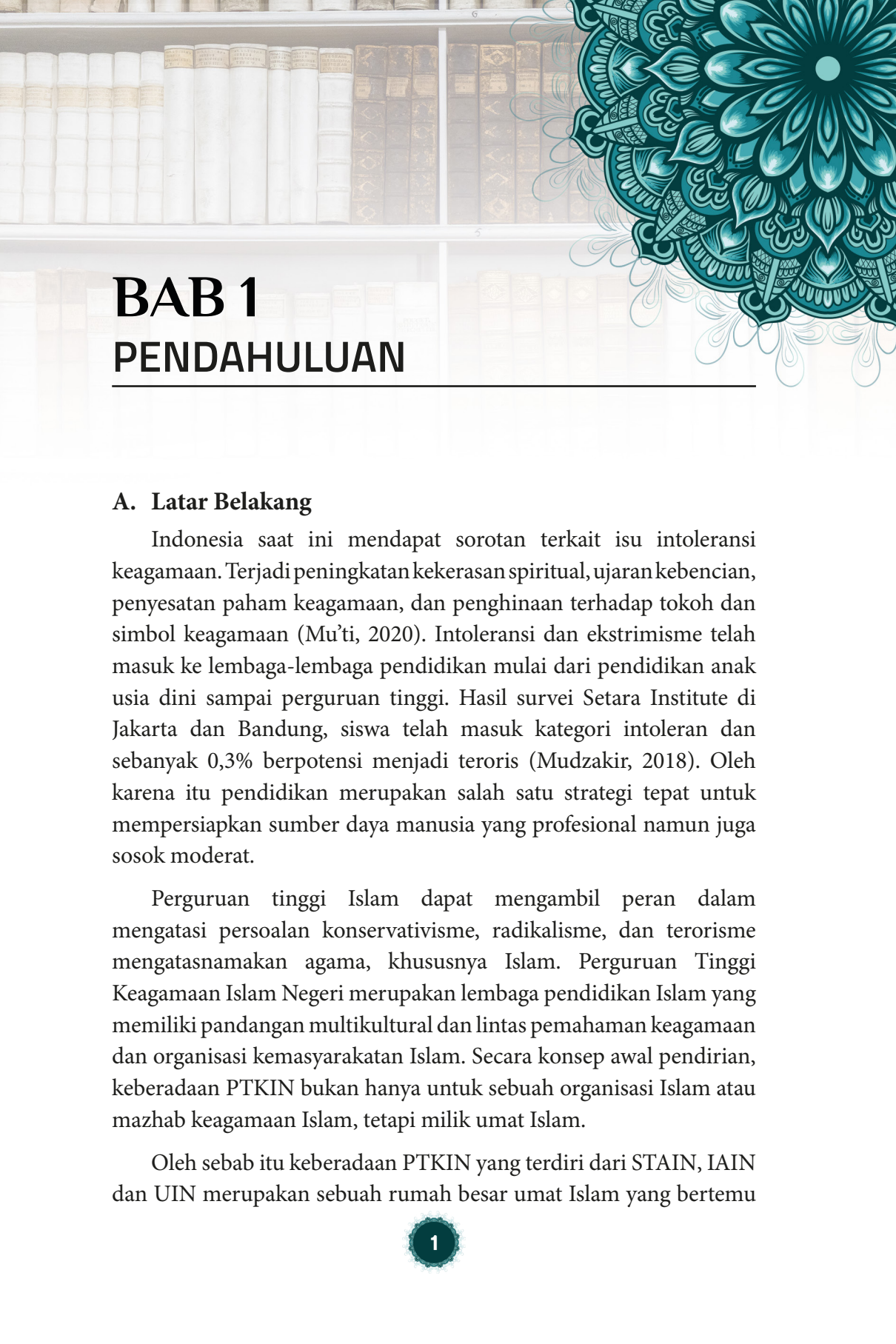
BAB 5

| | |
|-----------------------------------|-----|
| PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Rekomendasi..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | 101 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Penulis melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) di UIN Raden Mas Said Solo | 46 |
| Gambar 2. | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) di Manado bersama para akademisi dan aktivis lintas agama | 47 |
| Gambar 3. | Penulis melakukan wawancara bersama Ketua LPPM IAIN Ambon | 48 |
| Gambar 4. | Penulis di Papan Selamat Datang IAIN Ambon | 48 |
| Gambar 5. | Penulis di depan Gedung K.H. M. Hasyim Asy'ari IAIN Salatiga | 53 |
| Gambar 6. | Gedung Rektorat IAIN Manado | 57 |
| Gambar 7. | Salah satu penulis berpoto di bawah Patung Yesus Memberkati | 58 |
| Gambar 8. | Gereja Silo berada di Pusat Kota Ambon | 60 |
| Gambar 9. | Salah satu grafiti di sudut kota kawasan Muslim | 61 |
| Gambar 10. | Mediaonline Islam Santun UIN Raden Mas Said Solo | 65 |
| Gambar 11. | Taman Moderasi UIN Raden Mas Said Solo | 71 |
| Gambar 12. | “Sekali Yesus Tetap Yesus” Ekspresi Beragama Umat Kristen di Manado | 76 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini mendapat sorotan terkait isu intoleransi keagamaan. Terjadi peningkatan kekerasan spiritual, ujaran kebencian, penyusutan paham keagamaan, dan penghinaan terhadap tokoh dan simbol keagamaan (Mu'ti, 2020). Intoleransi dan ekstrimisme telah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Hasil survei Setara Institute di Jakarta dan Bandung, siswa telah masuk kategori intoleran dan sebanyak 0,3% berpotensi menjadi teroris (Mudzakir, 2018). Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu strategi tepat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional namun juga sosok moderat.

Perguruan tinggi Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan konservatisme, radikalisme, dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya Islam. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pandangan multikultural dan lintas pemahaman keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Islam. Secara konsep awal pendirian, keberadaan PTKIN bukan hanya untuk sebuah organisasi Islam atau mazhab keagamaan Islam, tetapi milik umat Islam.

Oleh sebab itu keberadaan PTKIN yang terdiri dari STAIN, IAIN dan UIN merupakan sebuah rumah besar umat Islam yang bertemu

dan mencari titik temu dalam dunia akademik untuk menyelesaikan berbagai persoalan keberagaman yang terjadi di masyarakat melalui program keilmuan yang tersedia.

Keberagaman memiliki manfaat dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Namun keberagaman juga berpotensi untuk memunculkan friksi di dalam kelompok dan memunculkan konflik (Wenardjo & Panggabean, 2021). Indonesia saat ini mengalami persoalan intoleransi. Kasus-kasus intoleran berbentuk intimidasi dan kekerasan berdasarkan agama dilakukan oleh kelompok Islam militan (Widiasari, 2018).

Kelompok kecil ekstrim Islam membenarkan tindakan intoleran dan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam (Institute, 2018). Fakta-fakta tentang tindakan intoleran dan kekerasan berdasarkan agama ini perlu diatasi dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah optimalisasi peran perguruan tinggi Islam dalam mengarusutamakan multikulturalisme dan moderasi beragama.

Perguruan tinggi Islam yang saat ini yang sudah mengembangkan paradigma keilmuan dan berdampak pada pendirian program studi umum yang integratif, sangat berpeluang menjadi sebuah lokomotif perubahan sosial (Fridiyanto, 2020). Di perguruan tinggi Islam terdapat bidang keilmuan yang mempelajari agama-agama, dapat dilihat dari keberadaan program studi dan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Melalui kajian-kajian teologis, sosiologis, dan antropologis yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam semakin dapat menguak problem keagamaan dengan beragam dinamika sosial di masyarakat.

Kajian-kajian akademik yang dikembangkan di PTKIN diharapkan dapat menjadi sarana dan media untuk internalisasi mempersiapkan sumber daya manusia moderat serta hubungan antar umat Islam dengan umat beragama lainnya. Di perguruan tinggi Islam terjadi pertemuan dengan berbagai paham keagamaan

di kalangan umat Islam. Dialog-dialog teologis menjadi basis untuk dapat membangun masyarakat multikultural dan moderat.

Pertemuan akademis di level akademisi PTKIN ini penting untuk membangun dialog inklusif sebagaimana yang diharapkan terjadi di level masyarakat di luar kampus. Sehingga ruang-ruang akademis perguruan tinggi Islam dapat menjadi *social capital* dalam menarasikan toleransi dan moderasi beragama.

Ekawati (2019) mengatakan bahwa teologi *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan di PTKIN memperlihatkan ajaran Islam yang damai, cinta damai, anti kekerasan, serta menghargai beragam perbedaan. Wenardjo (2021) menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pelaksanaan nilai-nilai agama lebih berpotensi dalam mempromosikan keterbukaan dan multikulturalisme.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa apa yang menjadi visi PTKIN dapat menjadi titik temu berbagai perbedaan pandangan. Sehingga dengan beragam perbedaan yang bertemu akan dapat memunculkan konsep dan praktik relativitas internal dan relativitas eksternal. Relativitas internal terjadi kesalingpahaman di internal umat Islam, sedangkan relativitas eksternal yaitu terjadinya dialog antar umat beragama untuk menemukan sebuah sikap saling bersikap toleran, dan lebih pluralis serta moderat. Apa yang dilakukan di perguruan tinggi Islam sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia moderat dengan perpektif multikulturalisme dan moderasi beragama.

Pendidikan multikultural yang dijalankan di pendidikan tinggi merupakan sebuah keharusan, karena keberagaman di Indonesia yang dilatari perbedaan agama, etnik dan budaya (Mustamin & Ulum, 2018). Menurut Krishnamurti (2003) pendidikan multikultural memberikan manfaat kepada mahasiswa. Sebagai lembaga yang terlibat dalam mempromosikan multikulturalisme menjadi penting untuk menilai kualitas dan keberhasilan inisiatif tersebut dan meningkatkan pengalaman pendidikan untuk semua mahasiswa. Krishnamurti

(2003) mengatakan pendidikan multikultural membawa perhatian pada isu-isu seperti ras, jenis kelamin, usia, kelas, orientasi seksual, disabilitas, dan agama.

Perguruan tinggi bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat integritas dan peradaban (Wahid, 2020). Tugas perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri tidak hanya mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang masing-masing. Pekerjaan yang tidak mudah dijalankan adalah bagaimana PTKIN juga mempersiapkan profil alumni yang profesional namun memiliki sikap terhadap multikultural, toleransi dan moderasi beragama. Sehingga dapat terlibat dalam mendinamisir masyarakat di lingkungan masing-masing mengenai pentingnya menyelesaikan konflik, jika terdapat gesekan antar umat beragama.

Perguruan tinggi Islam dituntut dapat terlibat aktif dalam melakukan aktivitas bina damai, sebuah kerja yang bukan hanya mewujudkan perdamaian, tapi juga penting untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan perdamaian. Namun dalam faktanya, perguruan tinggi umum maupun Islam sudah mulai banyak terdapat gerakan yang memiliki perspektif ideologi Islamis yang anti Negara Kesatuan republik Indonesia. Perguruan tinggi menjadi arena pertarungan ideologi (Fridiyanto & Rafi'i, 2021).

Lembaga pendidikan memengaruhi pembentukan wawasan kebangsaan generasi muda, karena waktu mereka banyak dihabiskan di lembaga pendidikan (Sarastiani, 2020). Perguruan tinggi berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda moderat dan inklusif yang memiliki visi kebangsaan (Fridiyanto, 2021). Berbagai strategi dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi dalam upaya menginternalisasikan multikulturalisme dan moderasi beragama, merupakan tantangan untuk dapat mewujudkannya.

Dalam implementasi pendidikan multikultural terdapat kesulitan menjalankannya di perguruan tinggi Islam. Fong (2004) mengemukakan bahwa, kendala dalam implementasi pendidikan

multikultural terjadi karena pendidikan multikultural dinilai membebani, membingungkan, mengganggu, dan bahkan membuat frustrasi para pendidik. Hal ini dialami oleh para pendidik karena mereka harus menyesuaikan dimensi pedagogis dalam menjalankan pendidikan multikultural.

Berdasarkan tinjauan penelitian di atas dapat dilihat bahwa perguruan tinggi Islam sangat berperan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia profesional yang memiliki perspektif multikultural dan moderat. Oleh sebab itu, penting dilakukan sebuah penelitian untuk mempelajari bagaimana perguruan tinggi Islam negeri dalam usaha mengarusutamakan multikulturalisme dan moderasi beragama dengan menjalankan pendidikan multikultural dan program moderasi beragama.

PTKIN yang dinilai dapat menjadi katalisator dalam menjalankan pendidikan multikultural, dalam fakta lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan secara totalitas untuk mewujudkan apa yang diidealkan. Terdapat banyak tantangan perguruan tinggi Islam dalam mengarusutamakan multikulturalisme dan moderasi beragama.

Konsep multikulturalisme dan moderasi beragama mengalami tantangan implementasi di perguruan tinggi Islam. Apakah harus diterapkan dalam sebuah mata kuliah atau berjalan secara terintegrasi yang dijalankan dalam *hidden curriculum*.

Dalam menjalankan konsep multikultural dan moderasi beragama, dibutuhkan keterbukaan untuk dialog. Masih terdapat sikap saling curiga dengan tidak intensnya kerjasama antara perguruan PTKIN dengan perguruan tinggi Kristen atau perguruan tinggi yang didasarkan agama. Jika terdapat kerjasama PTKIN dengan perguruan tinggi non Islam bukanlah didasarkan pada kebijakan resmi dari PTKIN namun lebih kepada inisiatif akadmisi yang intens dengan isu multikultural, toleransi dan moderasi beragama. Sehingga persentuhan akademis dan dialog ilmiah belum secara sistematis

dan massif dapat ditemukan. Tidak adanya kebijakan dan komitmen kolaborasi akademis antara PTKIN dengan perguruan tinggi atau lembaga non Islam ini berpotensi untuk memperkuat sikap saling curiga yang dapat membuka celah konflik.

Dalam buku ini, penulis menyajikan temuan penelitian lapangan yang diperoleh dari lokasi penelitian di empat perguruan tinggi sebagai berikut: UIN Raden Mas Said Solo, IAIN Salatiga, IAIN Manado, dan IAIN Ambon. Pemilihan empat lokasi penelitian ini dengan argumentasi untuk memberikan perbandingan bagaimana peran PTKIN di daerah yang memiliki indeks toleransi tinggi seperti yang dimiliki oleh Kota Salatiga, dan Kota Manado, dan dibandingkan dengan kota yang memiliki sejarah dan potensi konflik keagamaan yang kuat seperti ditemukan di Kota Ambon dan Kota Solo.

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama belum berjalan secara optimal di perguruan tinggi Islam?
2. Bagaimana implementasi pembangunan sumber daya manusia moderat berbasis pendidikan multikultural dan program moderasi beragama di perguruan tinggi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menemukan konsep pembangunan sumber daya manusia moderat dengan pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama.
2. Untuk menemukan implementasi pembangunan sumber daya manusia moderat berbasis pendidikan multikultural dan moderasi beragama di perguruan tinggi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi untuk perbaikan sumber daya manusia moderat dengan pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama.
2. Memberikan konsep teoritik bagi kajian sumber daya manusia berbasis multikultural dan moderasi beragama.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi

1. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Ajaran Islam sebagaimana banyak disampaikan dalam Alquran sangat menghargai keragaman. Salah satunya diungkapkan dalam al-Qur'an mengenai keragaman bahasa dan suku bangsa. Islam merupakan agama yang inklusif bahwa dengan keragaman justru untuk menyatukan ummat dan sebagai bukti ke esaan Allah (Shihab, 2009). Pluralitas dalam perspektif Islam merupakan *sunnatullah* dan tidak dapat dipungkiri. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mengungkap persoalan pluralitas dengan sangat jelas (Maarif, 2009). Oleh karena itu, tema-tema multikultural, bukanlah fenomena atau konsep baru dalam dunia Islam.

Multikulturalisme dalam pandangan Amin Abdullah merupakan sebuah paham yang fokus pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Penekanan utama multikulturalisme yaitu pada kesetaraan budaya (Naim, 2017). Multikulturalisme merupakan prinsip hidup damai yang dilandasi sikap toleran terhadap budaya lain (Zarbaliyev, 2017).

Zarbaliyev (2017) menjelaskan bahwa multikulturalisme memandang hubungan yang berbeda antara budaya minoritas dan budaya mayoritas. Makna multikulturalisme pertama-tama mempertimbangkan keragaman etnis, ras dan budaya, serta nilai-nilai yang digunakan atas dasar keragaman tersebut.

Dalam masyarakat multi etnis, multikulturalisme sebagai politik yang bertujuan untuk perlindungan dan pengembangan keragaman etnis, ras, agama dan budaya. Menciptakan persyaratan yang sama untuk pengembangan nilai-nilai etnis-budaya mayoritas dan etnis minoritas, menciptakan dasar bagi budaya yang berbeda, serta saling mempengaruhi. Dengan demikian, multikulturalisme berawal dari gagasan dominasi budaya dalam ruang pembangunan sosial, pengakuan dan implementasi kepentingan kelompok etnis-budaya (Zarbaliyev, 2017).

Multikulturalisme mempertimbangkan perlindungan dan pengembangan keragaman etnis-budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Negara yang melakukan propaganda multikulturalisme akan memberi pengaruh besar bagi peningkatan politik negara, dan ideologi negara. Jenis budaya ini didasarkan pada tiga prinsip penting sebagai berikut: Pertama, prinsip budaya ganda: Prinsip-prinsip ini menyatakan setiap budaya sebagai budaya yang unik. Ketiga, prinsip penentuan identitas diri-untuk-hak: Prinsip-prinsip ini menentukan bahwa setiap bangsa memiliki hak atas identitas budaya tanpa menerapkan sentralisasi etnis. Negara berkepentingan untuk melakukan pertemuan beragam perbedaan kultural, salah satu yang penting dilakukan adalah dengan pendidikan multikultural.

Dalam sejarahnya pendidikan multikultural muncul dari gerakan hak-hak sipil di tahun 50 an dan 60 an (Krishnamurthi, 2003). Pendidikan multikultural mengacu pada pembelajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai terkait dengan penghormatan dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda

dan perbedaan lain yang mencakup ras, suku, agama (Arifin & Hermino, 2017). Pendidikan multikultural dianggap dapat meningkatkan pemahaman pendidik tentang kompleksitas budaya yang berbeda dan interseksionalitas yang melekat pada ras, jenis kelamin, kelas, dan pengecualian untuk membebaskan siswa dari struktur yang menindas dalam masyarakat.

Terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang. Pertama, Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain ; Kedua, Hubungan manusia, membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial; Ketiga, *Single group studies*, mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat; Keempat, Pendidikan multikultural, menyediakan kurikulum yang menekankan kepada adanya perbedaan. Tujuannya yaitu untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas social; Kelima, Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial, sering juga disebut sebagai *critical multicultural education*. Bertujuan untuk menyatukan perbedaan kultural dan menentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat (Banks & Banks, 2004).

Banks (2020) menyampaikan tentang masih banyaknya kebingungan mengenai pendidikan multikultural di kalangan guru dan para praktisi pendidikan. Multikulturalisme adalah istilah yang sering digunakan oleh para kritikus keragaman untuk menggambarkan serangkaian praktik pendidikan yang mereka lawan. Multikulturalisme dan pendidikan multikultural memiliki arti yang berbeda. Pendidikan multikultural merupakan gerakan reformasi pendidikan yang mencoba mereformasi lembaga pendidikan dengan cara memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk belajar.

Menurut Banks (2020) pendidikan multikultural merupakan proses berkelanjutan. Tipologi dimensi ini dapat membantu praktisi mengidentifikasi dan merumuskan reformasi yang menerapkan pendidikan multikultural dengan cara yang bijaksana, kreatif, dan efektif. Gay (2003) mengatakan bahwa kurikulum yang diisi dengan pendidikan multikultural dapat mendorong keberhasilan akademik serta mempersiapkan peserta didik dalam berperan sebagai warga negara yang produktif. Di negara seperti Amerika Serikat, pendidikan multikultural merupakan bagian integral untuk meningkatkan keberhasilan akademik siswa kulit berwarna dan mempersiapkan semua pemuda untuk kewarganegaraan demokratis dalam masyarakat pluralistik.

Banyak muncul kajian yang mempertanyakan apakah pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan atau merupakan sebuah konsep politik. Karena dalam pendidikan multikultural terdapat persoalan mengenai orang kulit berwarna, kaum minoritas, dan budaya pluralistik (Garcia, Jesus and Pugh, Sharon, 2016). Pada dasarnya, proses pendidikan, bahkan sampai ke dalam ruang kelas atau kuliah sekalipun, merupakan peristiwa politik. Negara berkepentingan untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki wawasan kewargaan atau kebangsaan, pendidikan multikultural salah satu pilhan strategi yang dapat diterapkan.

Cara-cara umum untuk melihat multikulturalisme dalam pendidikan, di antaranya: sebagai pendekatan kurikulum, pengalaman kelompok minoritas tertentu atau dari semua kelompok minoritas; sebagai cara memasukkan dalam kurikulum perspektif minoritas lokal atau regional, biasanya dari satu kelompok besar; sebagai pendekatan kompensasi di mana kurikulum menggambarkan kelompok minoritas sebagai heroik atau martir; atau sebagai fokus pada isu-isu internasional daripada pada kelompok etnis, ras, dan budaya lainnya (Garcia,

Jesus and Pugh, Sharon, 2016). Pendidikan multikultural, sering dipandang sebagai upaya meredam konflik sosial saja.

Di Amerika Serikat konseptualisasi pendidikan multikultural cenderung dipandang sebagai preferensial, menenangkan, atau menghindar. Hal ini terjadi karena hegemoni dan dominasi kalangan kulit putih. Kelompok kulit putih tidak menganggap diri mereka sebagai anggota dari kelompok mana pun yang terlibat dalam pluralisme budaya, yang membuat mereka memberikan pembelaan bahwa mereka tidak “berkualifikasi” untuk mengajarkannya (Garcia, Jesus and Pugh, Sharon, 2016). Corak pendidikan multikultural yang dianggap hegemonik terhadap kelompok minoritas, dalam perkembangannya mulai terdapat inovasi dan pengembangan, secara konsep maupun praktik.

Pendidikan multikultural yang lazim diidentikan dengan pengalaman negatif masyarakat, kaum minoritas, dan persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Perspektif ini merupakan cara pandang yang salah dan tidak lagi relevan (Krishnamurthi, 2003). Terlepas dari berbagai kekurangan konsep dan praktik pendidikan multikultural, setidaknya usaha untuk mengurangi berbagai konflik yang didasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Di Indonesia, konsep pendidikan multikultural perlu melakukan adaptasi konsep dari yang diterapkan di Amerika Serikat. Karena terdapat berbagai perbedaan sosiologis, antropologis, dan sistem politik yang berlaku di Indonesia dan Amerika.

2. Pendidikan Multikultural: dari Teori ke Praktik

Agar dapat mengartikulasikan konsepsi teoretis pendidikan multikultural ke dalam praktik. Pendidik harus secara sistematis menjalin pendidikan multikultural ke dalam inti pusat kurikulum, pengajaran, kepemimpinan pendidikan, pembuatan kebijakan, konseling, iklim kelas, dan penilaian kinerja. Pendidik harus

menggunakan konten multikultural, perspektif, dan pengalaman untuk mengajar membaca, matematika, sains, dan studi sosial (Gay, 2003). Multikulturalisme bisa diajarkan dengan berbagai fenomena yang terjadi di lembaga pendidikan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat nasional maupun global.

Gay (2003) menjelaskan bahwa peserta didik perlu memahami bagaimana isu-isu multikultural membentuk tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sebuah negara. Di Amerika Serikat isu-isu multikultural secara fundamental memengaruhi kehidupan pribadi warga negara. Pendidik perlu menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang sistematis untuk mencapai integrasi kurikulum multikultural.

Sleeter (2018) mengungkapkan bahwa kajian dan implementasi pendidikan multikultural masih terjebak dalam persoalan desegregasi, pendidikan dwi bahasa, pendidikan kebutuhan khusus, dan penggunaan pengarusutamaan yang berusaha membuat lembaga pendidikan lebih mudah diakses oleh lebih banyak peserta didik dengan menghilangkan hambatan sekolah secara umum dan program khusus di dalam sekolah. Namun demikian pendidikan multikultural telah menjadi gerakan reformasi yang bertujuan mengubah isi dan proses di sekolah.

Sleeter (2018) menyempurnakan model pendidikan multikultural dengan mengevaluasi kritis literatur pendidikan multikultural. Menurut Sleeter (2018) perlu konsep “Mengajar Perbedaan Budaya” yang digunakan untuk mengasimilasi siswa kulit berwarna ke dalam arus utama budaya dan struktur sosial yang ada dengan menawarkan jembatan transisi dalam program yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian terdapat “Studi Kelompok Tunggal” yang berfungsi memupuk pluralisme budaya dengan mengajarkan kursus tentang pengalaman, kontribusi, dan perhatian dari kelompok etnis, gender, dan kelas sosial yang berbeda.

Kemudian terdapat pendekatan "Pendidikan Multikultural" yang mempromosikan pluralisme budaya dan kesetaraan sosial dengan mereformasi program sekolah untuk semua siswa agar mencerminkan keragaman. Terakhir yaitu "Pendidikan yang Multikultural dan Rekonstruksionis Sosial" mempersiapkan siswa untuk menantang ketidaksetaraan struktural sosial dan untuk mempromosikan keragaman budaya (Grant & Sleeter, 2012).

Huerta (1999) mengatakan bahwa tantangan utama ketika menerapkan pendidikan multikultural yaitu kecenderungan pendidik untuk menggeneralisasi tentang karakteristik budaya. Menurut Huerta (1999) jika pendidikan multikultural ingin lebih dipahami dan dilaksanakan dengan cara yang lebih konsisten secara teoritik, paradigma yang memandu pengajaran multikultural harus dikonseptualisasi dengan jelas oleh pendidik. Sehingga pendidik tidak frustrasi yang berujung pada munculnya sikap resistensi dan berdampak pada menghambat perkembangan pendidikan multikultural (Huerta, 1999).

Dalam konteks pembentukan sebuah bangsa, McCormick mengajukan empat model multikulturalisme, sebagai berikut:

Pertama, model *melting pot*; dalam pengertian peleburan etnisitas dan budaya menjadi sebuah bangsa baru, sehingga ciri-ciri etnisitas dan budaya lama yang membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang.

Kedua, model *assimilation*, yaitu suatu pandangan yang membenarkan eliminasi perbedaan-perbedaan yang ada dan membaaur dengan budaya kelompok dominan. Biasanya warna budaya kelompok dominan masih mudah dikenali meskipun sudah berkurang. Sebaliknya budaya kelompok lemah akan menjadi kabur dan hilang.

Ketiga, model *salad bowl*, yang memandang keharusan setiap individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati keragaman kultural yang berasal dari etnis, budaya,

agama, bahasa, dan wilayah dimana individu dan kelompok berasal. Pada saat yang sama mendukung kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan secara damai, Bangsa Indonesia mengikuti model ketiga ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Eka”.

Keempat, model *open nation*, suatu pandangan masyarakat terbuka, masyarakat dengan segala keragamannya dibebaskan mengambil cara yang dikehendaki dalam membentuk suatu bangsa (Tolchah & Mu’ammam, 2019)

3. Tantangan Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi

Organisasi multikultural adalah organisasi yang benar-benar berkomitmen terhadap keragaman representasi anggotanya; peka untuk memelihara lingkungan yang terbuka, suportif dan responsif; sedang bekerja menuju dan dengan sengaja memasukkan unsur-unsur budaya yang beragam dalam operasinya yang sedang berlangsung (Manning & Coleman-boatwright, 2000). Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia, berkepentingan untuk menjalankan pendidikan multikultural.

Lingkungan kerja global, tenaga kerja yang beragam, dan kebutuhan akan pendidikan inklusif dan lingkungan kampus telah memberikan dorongan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mempromosikan keragaman dan multikulturalisme di perguruan tinggi (Krishnamurthi, 2003).

Popov (2012) a 19-item survey was completed by students (N= 141) beragam pendididkan multikultural sangat penting dilaksanakan di perguruan tinggi. Namun demikian terdapat banyak tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Salah satu persoalan di perguruan tinggi adalah mahasiswa masih sangat terikat dengan identitas dan kultur mereka sendiri.

Manning dan Coleman (2000) mengemukakan pentingnya untuk melakukan transformasi universitas yang monokulturalisme menjadi multikulturalisme. Perlu mengubah praktik sehingga mahasiswa dan profesional kulit berwarna direkrut secara aktif ke pendidikan tinggi, diwakili dalam program kampus, dan didorong untuk menggunakan layanan kampus.

Manning dan Coleman (2000) mengemukakan persoalan pendidikan multikultural di perguruan tinggi bahwa budaya yang telah mendominasi melalui berbagai keadaan sejarah meresapi organisasi dan institusi sedemikian rupa sehingga banyak anggota komunitas kampus menerima karakteristik monokulturalnya sebagai sesuatu yang diberikan atau sebagai cara melakukan sesuatu.

Namun demikian pengelola perguruan tinggi dapat mendalilkan bahwa institusi melalui proses paralel sehingga melalui pendidikan, kesadaran, dan kepekaan, institusi dapat menjadi multikultural. Realitas budaya dominan di kampus dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat dan berpotensi berbahaya (Manning & Coleman-boatwright, 2000).

Program pendidikan dan pelatihan kesadaran multikultural, khususnya di bidang kemahasiswaan, telah dimulai dalam upaya untuk meningkatkan rasa hormat dan mendorong nilai perbedaan budaya. Departemen kemahasiswaan membentuk, mengelola, dan mempengaruhi aspek penting dari lingkungan universitas: kehidupan tempat tinggal, serikat mahasiswa, kegiatan kampus, perencanaan karir, dan atletik. Staf kemahasiswaan dapat secara langsung mempengaruhi pembentukan lingkungan multikultural, membangun lingkungan kampus yang inklusif, dan mengubah struktur kelembagaan (Manning & Coleman-boatwright, 2000). Secara kebijakan, di perguruan tinggi, sangat perlu melembagakan pendidikan multikultural.

Krishnamurti (2003) menjelaskan bahwa di tingkat kurikuler, inisiatif multikultural di lembaga pendidikan tinggi perlu fokus pada persyaratan kursus multikultural, transformasi kursus dan kurikuler, pengakuan terhadap beragam gaya belajar dan mengajar, dan mengejar penelitian dan beasiswa multikultural. Kampus perlu mempertimbangkan empat dimensi keragaman kampus dan inisiatif multikultural yang membahas pendidikan dan beasiswa, akses dan kesuksesan, iklim kampus dan hubungan antar kelompok, serta kelangsungan dan vitalitas kelembagaan.

Banks (2001) menawarkan model konseptual tambahan untuk mempelajari pengalaman keragaman dalam pendidikan tinggi. Konsep Banks sangat cocok dan menguntungkan untuk studi institusi tunggal di mana akses ke berbagai data mendalam tentang pengalaman keragaman peserta didik dimungkinkan, misalnya, transkrip, silabus mata kuliah, dan survei.

Konsep pendidikan multikultural Banks (2001) mengatakan bahwa pengalaman keragaman siswa secara individu dan kolektif sangat penting. Banks menyediakan model konseptual komprehensif untuk mengukur efek unik serta gabungan dari pengalaman mahasiswa. Pengalaman dengan keragaman di perguruan tinggi. Misalnya, melalui kursus tentang ras dan kelas, lokakarya kesadaran ras, atau interaksi antar ras dalam lingkungan sosial, memaparkan mereka pada situasi baru dan asing dan memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan dan mempertimbangkan kembali konsepsi mereka yang ada.

Teori-teori untuk praktik pendidikan multikultural yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa perguruan tinggi, konsep internalisasi multikulturalisme sangat penting. Sebagai sumber daya manusia yang akan menghadapi berbagai budaya harus terbiasa dengan perbedaan. Agar dapat memiliki pandangan pluralis, maka pihak pengelola perguruan tinggi harus memiliki inisiatif program-program terkait pendidikan

multikultural. Strategi-strategi yang bisa dilakukan di antaranya adalah memasukan muatan multikultural ke dalam kursus atau perkuliahan. Selain itu perlu dilakukan pertemuan beragam kebudayaan yang ada di kampus. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesepamahaman melalui dialog-dialog.

B. Moderasi Beragama dan Perguruan Tinggi

1. Konsep dan Diskursus Moderasi Beragama

Dalam Buku Pedoman Moderasi Beragama terbitan Kementerian Agama (Penyusun, 2019) dijelaskan bahwa konsep moderasi beragama merupakan sebuah sikap menjalankan keyakinan dan agamanya sendiri secara inklusif. Selalu memiliki rasa hormat terhadap praktik ibadah orang lain yang tidak satu agama. Seorang muslim yang moderat dapat menjauhkan diri dari sikap ekstrim berlebihan, tidak fanatik, reaksioner dan revolusioner.

Juga dijelaskan di buku Moderasi Beragama Kementerian Agama (2019) bahwa konsep moderasi beragama merupakan sebuah usaha mengurangi munculnya kelompok masyarakat yang ekstrim, kelompok ultra konservatif atau ekstrim kanan, dan di sisi lain terdapat kelompok liberal dan ekstrim kiri. Melalui konsep moderasi beragama maka sebuah perdamaian hakiki akan dapat dibangun dan dipelihara. Karena terwujudnya sikap saling menghormati, toleransi dan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Dalam konteks negara Indonesia, moderasi beragama sangat mendesak dan penting untuk dijalankan dan perlu diinternalisasikan dalam berbagai lini.

Hasan (2022) menjelaskan bahwa program moderasi beragama yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk memperkuat pengelolaan multikultural, keragaman kehidupan agama di Indonesia yang sedang mengalami hantaman konservatisme, radikalisme dan intoleran. Moderasi beragama diharapkan dapat

menjawab masalah-masalah tersebut. Melalui program moderasi beragama, akan dapat melakukan transformasi kehidupan kewargaan yang menghargai multikultural dan hak asasi manusia.

Sifat dan sikap moderat merupakan identitas umat Islam, seperti yang dinyatakan dalam Surat al Baqoroh : 143. Menurut Abu Ja'far bahwa "*wasathan*" berarti berada di tengah tengah, yaitu pemahaman agama berada di tengah antara terlalu berlebihan (*Ghuluw*) dalam beragama seperti umat Nasrani dan terlalu menggampangkan (*taqsir*) dalam beragama seperti kaum Yahudi.

Islam berdiri atas prinsip *washatiyah* dalam segala bangunannya dan karakternya, prinsip *washatiyah* dapat digunakan untuk mengobati individu maupun masyarakat, baik dalam masalah aqidah, ibadah, mu'amalah, ekonomi, politik, sosial budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nilai-nilai moderasi beragama, sebagaimana dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama berjudul *Moderasi Keagamaan* (2019), menyebutkan bahwa ada empat nilai utama yang menjadi inti dari gerakan moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan dan kearifan terhadap budaya lokal (Nirwana, 2021). Melalui program moderasi beragama diharapkan muncul sumber daya manusia yang memiliki pandangan toleran.

Model pendidikan agama Islam yang pluralistis, merupakan konsep yang membentuk generasi muda berjiwa pluralis. Memahami ajaran dan nilai agama secara mendalam, taat beribadah, berakhlak mulia, toleran dan dapat menerima pemeluk agama yang berbeda (Mu'ti, 2020). Pendidikan agama pluralistis diharapkan dapat membangun generasi muda menjadi aktor dan pelopor perdamaian. Gagasan dan program moderasi beragama muncul sebagai revisi konsep deradikalisasi.

Pasca Tragedi September Eleven di Amerika Serikat dan peristiwa-peristiwa teror di Indonesia seperti Bom Bali, di Indonesia banyak terdapat program dan proyek-proyek deradikalisasi dengan harapan akan meminimalisir radikalisme, ekstrimisme, dan fundamentalisme yang dicurigai pihak Barat berada di kalangan Islam. Namun demikian konsep deradikalisasi dinilai terlampau memberi stigma negatif, sehingga kemudian dimunculkan istilah pengganti deradikalisasi dengan moderasi beragama. Intens dan *massive* nya program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak *Non Government Organisations* (NGOs) mengenai bahayanya aksi terorisme yang berasal dari ideologi trans nasional atau yang muncul secara nasional.

Berdasarkan riset Wahid Foundation (2017) karakteristik kelompok radikal di Indonesia, yaitu: 1) Usia muda dan laki-laki; 2) Cenderung memahami agama secara literalis; 3) Terpapar informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian; 4) Cenderung mengingkari pemenuhan hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok lain; 5) Cenderung mendukung tindakan dan gerakan radikal. Oleh karena itu salah satu rekomendasi Wahid Foundation kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama mengembangkan modul-modul pembelajaran penguatan hak-hak kewargaan, toleransi, dan perdamaian di lingkungan kampus dan sekolah negeri yang kreatif berbasis teknologi (Wahid Foundation, 2017).

Namun demikian terdapat polemik dan diskursus dari berbagai kalangan. Nadjib Burhani mengkritik penggunaan kata moderat bisa digunakan oleh kelompok manapun, seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Konsep moderat kehilangan makna karena terlibat mengeluarkan fatwa pelarangan dan demonstrasi anti Ahmadiyah dan Syiah, serta mendukung aksi terorisme di negara lain bukan sikap dan tindakan yang membuat seseorang keluar dari kategori moderat.

Burhani menyimpulkan bahwa moderat merupakan bungkus atas sikap ketidakmampuan dalam keberpihakan terhadap kalangan minoritas yang mengalami tindakan intoleran dalam kebebasan menjalankan keyakinan dan beragama. Perguruan tinggi Islam perlu memberikan jawaban kritik Burhani mengenai praktik program moderasi tersebut dengan menampilkan sumber daya manusia moderat yang secara progresif berani berpihak terhadap masyarakat minoritas. Sehingga konsep moderat, bukan hanya sikap diam dan netral, tetapi terlibat secara aktif dalam berbagai persoalan sikap moderat, khususnya dalam konflik keagamaan.

2. Dinamika Moderasi Beragama

Ta'aruf (saling mengenal) sebagaimana terdapat dalam surat al Hujarat ayat 13, merupakan indikasi positif dalam suatu masyarakat plural untuk dapat hidup bersama, saling menghormati dan saling menerima perbedaan yang ada di antara mereka. *Ta'aruf* menjadi gerbang budaya yang memberi akses untuk langkah-langkah berikutnya dalam membangun kebersamaan kehidupan kultural, melalui karakter-karakter inklusif seperti *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), *ta'awun* (tolong menolong), dan *tawazun* (harmoni). Hal ini disebut sebagai “akar-akar nilai inklusif” dalam multikulturalisme Islam (Tolchah & Mu'ammam, 2019). Dua akar nilai inklusif ini untuk di Indonesia diurusutamakan oleh dua organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Juba (2021) menyatakan di Indonesia perjuangan moderasi Islam dimotori oleh dua organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua organisasi kemasyarakatan Islam ini harus menghadapi kelompok Islam konservatif. Berbagai tindakan intoleran yang mengatasnamakan Islam menyasar kelompok minoritas dan selalu mengambil sikap melawan pluralitas budaya bangsa. Kelompok moderasi beragama hadir sebagai

penyeimbang kelompok yang sering menuduh kelompok lain sesat dan murtad (takfiri).

Namun demikian Organisasi Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama mendapatkan serangan karena aktivitasnya yang menyebarkan Islam Washatiyah. Fridiyanto (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konsep Islam Nusantara, sebagai artikulasi dari pandangan moderat NU sering dijadikan bahan serangan kelompok Islam, dengan berbagai propaganda yang menyudutkan gagasan moderasi tersebut. Dari serangan-serangan terhadap NU tersebut, tidak tertutup kemungkinan perguruan tinggi yang mengarusutamakan moderasi beragama akan mendapatkan kesalahpahaman publik, khususnya kelompok konservatif yang memang tidak menginginkan Islam moderat menjadi model Islam Indonesia.

Selain dua organisasi yang dikemukakan Juba (2021) ini, perguruan tinggi Islam memiliki peran penting dalam menyuarakan Islam Wasathiyah. Abdullah (2021) menjelaskan bahwa elemen-elemen yang membentuk moderasi beragama di antaranya pemahaman Islam, keseimbangan syari'ah, nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas dalam agama, hak-hak kelompok minoritas, keterlibatan nasional, anti kekerasan, sikap persahabatan dan kurikulum pendidikan. Elemen-elemen pembentuk moderasi beragama ini dapat ditemukan di perguruan tinggi Islam, yang sangat berperan penting dalam menjalankan program moderasi beragama.

3. Moderasi Beragama: Menagih Peran Perguruan Tinggi

Agus (2018) mengatakan bahwa terdapat ancaman yang asalnya dari dalam atau pun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan Indonesia. Ancaman nyata yang sudah dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah adanya peningkatan aktivitas radikalisme yang ujungnya adalah tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Perguruan tinggi yang selama ini dikenal sebagai tempat persemaian manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa aman dari adanya pengaruh radikalisme. Berita Kompas (2018) berdasarkan laporan Badan Intelijen Negara melaporkan adanya tujuh perguruan tinggi terpapar paham radikal. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena sesungguhnya para pelajar dan mahasiswa yang akan menjadi tonggak masa depan negara ini. Agus (2018) menjelaskan paradigma yang ada saat ini di kampus, masalah nasionalisme atau radikalisme hanya tanggung jawab dari dosen kewarganegaraan semata, ini dirasakan sangat kurang tepat.

Agus (2018) menambahkan bahwa adanya unsur pendidik pada seorang dosen, menjadikan para dosen mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter mahasiswa. Dosen menjadi aktor utama dalam pembentukan dan pengembangan karakter para mahasiswa dengan keteladanan. Sebelum mendidik karakter para mahasiswa, seorang dosen paling tidak memiliki karakter yang sesuai dengan tugas utama seorang dosen.

Dosen dapat mempengaruhi putusan inovasi terhadap peserta didik untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui Pendidikan Kewarganegaraan dari aspek *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Oleh karena itu dosen sangat berperan melalui: Para dosen harus lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap para mahasiswanya; Para dosen harus secara berkesinambungan dan aktif mengingatkan para mahasiswanya untuk dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mendorong radikalisme di kampus; dan Para dosen harus lebih aktif berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh mahasiswanya, tanpa melihat fakultasnya pada setiap kesempatan.

Chalim (2018) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan, kurikulum, dan misi perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku anti-radikalisme mahasiswa. Pencegahan

paham radikalisme dan terorisme khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh paham dari luar.

Chalim (2018) merekomendasi beberapa strategi yang dapat dilakukan di perguruan tinggi dalam isu moderasi, sebagai berikut: Pertama, Kurikulum. Kurikulum adalah keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi pada perguruan tinggi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capai pembelajaran tertentu yang direncanakan.

Kedua, Kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks pendidikan, adalah kemampuan mengarahkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang didukung dengan sumber daya yang ada untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi dan perilaku sebagaimana diharapkan.

Ketiga, Pendidikan karakter. Membangun pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi sangat penting dalam mencegah paham radikalisme. Hasil penelitian Susanti (2013) menunjukkan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi sangat diperlukan guna membentuk dan membangun mahasiswa agar menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai luhur ideologi negara Indonesia dan memperkuat karakter yang didapat mahasiswa pada tingkat pendidikan sebelumnya.

Hefni (2020) menganjurkan perguruan tinggi dapat mengoptimalkan dunia digital sebagai media pengarusutamaan moderasi beragama. Dunia digital menyediakan prasarana narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas yang ditandai dengan pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas

keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Perguruan tinggi dapat menjadi penyeimbang berbagai diskursus keagamaan yang beredar di dunia digital. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra narasi untuk melahirkan *framing* beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran. Narasi dan kajian keagamaan merupakan arena kompetitif yang memiliki potensi besar untuk diproduksi oleh kelompok tertentu guna menyebarluaskan ide, gagasan, dan simbol keagamaan kepada publik (Hefni, 2020).

Kontribusi terpenting perguruan tinggi dalam program moderasi beragama yaitu internalisasi nilai-nilai moderat dapat disampaikan melalui kurikulum berbentuk mata kuliah atau juga dapat dijalankan dengan pendekatan budaya akademik. Selain itu, kalangan intelektual yang terbiasa dengan perdebatan teoritik juga menjadi bekal mendasar untuk memahami dan menerima keragaman.

C. Sumber Daya Manusia Moderat dan Peran Perguruan Tinggi Islam

1. Mengelola Sumber Daya Manusia: Peran Perguruan Tinggi

Universitas merupakan sumber utama ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang ada untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Perguruan tinggi berkontribusi dalam transfer pengetahuan melalui proses pendidikan dan pengabdian masyarakat. Pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi membantu masyarakat dengan menawarkan solusi alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan. Selanjutnya, universitas turut andil dalam menghasilkan pengetahuan sebagai

landasan dalam pengambilan keputusan.

Universitas juga berperan dalam alih teknologi untuk membangun produksi. Sebagai lembaga pendidikan, universitas bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat (Widyowati, 2016). Gordon dan Whitchurch (2007) mengatakan bahwa perguruan tinggi sangat penting dalam isu-isu sumber daya manusia. Oleh sebab itu perlu transformasi pengelolaan perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan dalam isu-isu sumber daya manusia.

Perguruan tinggi dengan program pengajaran, penelitian telah memberikan kontribusi terhadap kapasitas manusia. Melalui perguruan tinggi dapat tercipta inovasi teknologi, regenerasi ilmuwan, hasil-hasil penelitian, para pendidik, dan juga melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan (Erbaugh, J. M., Rwambali, E., & Mkandawire, 2017).

Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global di bidang ekonomi, seni, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi yang pada akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi para sarjana yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Dalam dunia budaya, budaya lokal adalah hal yang dipelajari dan diperoleh yang dengannya seseorang dapat beradaptasi dengan keadaan di sekitarnya dan ini dinamis dengan berlalunya waktu (Suradi, 2018). Dalam konteks moderasi beragama, perguruan tinggi Islam menjadi sebuah entitas yang melakukan internalisasi nilai-nilai moderat.

2. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Moderat dan Pluralis

Pendidikan Islam multikultural dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan; berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta mengembangkan sikap mengakui,

menerima dan menghargai keragaman berdasarkan al-Qur'an dan hadis (Aly, 2011). Secara normatif, al-Qur'an sendiri sudah menegaskan bahwa manusia memang diciptakan dengan latar belakang yang beragam sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hujurat:13 (Aly, 2011). Ajaran Islam yang mengakui keragaman dan perbedaan yang kemudian disampaikan kepada para mahasiswa, akan sangat bermanfaat ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat global.

Karjalainen (2021) menjelaskan selama beberapa dekade terakhir, globalisasi telah mempengaruhi dan mengubah fungsi perusahaan, perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka dengan bisnis global dan manajemen sumber daya manusia internasional. Tantangan baru tampaknya dikenakan kepada manajer internasional dan *human resources management* internasional: bagaimana menciptakan kerjasama antara karyawan yang mewakili latar belakang budaya yang berbeda dan bagaimana menemukan identitas bersama dalam tim yang memiliki corak multikultural.

Sumber daya manusia berbasis multikultural dapat dibangun dan dikelola dengan praktik dan alat sumber daya manusia: rekrutmen, manajemen antar budaya, mediasi, dan budaya organisasi. Selama beberapa dekade terakhir, globalisasi telah memengaruhi dan mengubah fungsi perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka dengan bisnis global, produksi global dan manajemen sumber daya manusia internasional (Karjalainen & Karjalainen, 2021).

Manajemen sumber daya manusia global berarti pembelajaran dan integrasi dalam tim karyawan yang memiliki perspektif multikultural. Pertanyaan tentang manajemen sumber daya manusia multikultural dan praktik manajerial dapat terjadi pada beberapa tingkatan: pertama, bagaimana menciptakan kerjasama antar budaya. Literatur tentang pengelolaan perbedaan budaya menunjukkan bahwa selama tiga puluh tahun terakhir faktor

budaya tampak lebih menjadi masalah dari pada keuntungan di perusahaan internasional (Karjalainen & Karjalainen, 2021). Perguruan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi Islam setidaknya perlu mempersiapkan masyarakat ASEAN.

Arifin (2017) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural berguna untuk menghadapi masyarakat ASEAN yang akan membuat pertemuan berbagai keragaman. Penerimaan terhadap keberagaman tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan multikultural menjadi strategis bagi negara-negara ASEAN untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, dan dapat dimaknai sebagai proses internalisasi nilai-nilai dalam lembaga pendidikan. Pendidikan tenaga kerja dicetak dengan kompetensi yang diharapkan mampu bersaing secara global. Pendidikan multikultural menjadi sangat urgen sebagai solusi menghadapi tantangan keragaman dunia.

Pendidikan berwawasan global atau disebut juga pendidikan global berarti pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali peserta didik memasuki era globalisasi agar peserta didik mampu bertindak secara lokal berdasarkan wawasan global (Suradi, 2018). Pendidikan global dirasakan karena kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan dunia semakin menyempit, batas negara menjadi kabur, proses universalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan pengelolaan pendidikan yang berwawasan global (Suradi, 2018).

Suradi (2018) mengatakan bahwa pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai tujuan pendidikan mengasah rasa, karsa, dan karya. Keterkaitan antara mempersiapkan sumber daya manusia dan multikulturalisme adalah solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, ras,

etnis, dan agama. Pluralitas budaya, seperti yang terdapat di Indonesia. Dengan pengembangan pendidikan multikultural di perguruan tinggi, maka dapat membangun nilai-nilai positif yang dibutuhkan para sarjana.

Pendidikan multikultural menekankan filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan penerimaan dan pemahaman dan komitmen moral terhadap keadilan sosial. Isu-isu multikultural tidak hanya sebagai upaya menyesuaikan diri dengan nilai global, namun juga dapat menyerap budaya lokal.

Budaya lokal tidak dapat dipisahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur budaya universal, seperti pandangan hidup, seni, sistem religi, sastra, kuliner, upacara adat, organisasi sosial, peralatan, mode, artefak, bahasa, bangunan, obat tradisional, dan hukum adat setempat (Suradi, 2018). Perpaduan nilai lokal dan global, akan dapat mempersiapkan warga negara yang dapat berdaptasi konteks nasional namun juga tidak gagap dalam budaya masyarakat dunia.

Choi (2010) beragumen bahwa mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini merupakan tantangan bagi masyarakat. Choi mengemukakan pada kasus masyarakat Korea Selatan yang amonolitik dengan satu bahasa, satu sejarah, dan satu etnis. Namun saat mereka menjadi masyarakat Korea maka orang Korea Selatan harus dapat mengakui keberagaman dalam masyarakat dan merevisi kepercayaan lama tentang siapa diri mereka.

Agar dapat mempersiapkan warga negara atau sumber daya manusia dengan perspektif keragaman maka pendidikan multikultural menjadi salah satu solusi. Warga negara diajarkan untuk memiliki wawasan luas, dan rasional bahwa di dunia terdapat banyak budaya dan semuanya saling memiliki ketergantungan.

Setiap warga sebuah negara adalah warga dunia, diperlukan sikap toleransi dan memahami perbedaan nasional dan sosial, sehingga menyadari posisi mereka sebagai masyarakat global yang besar. Oleh sebab itu dalam kebijakan kurikulum pendidikan di Korea mengacu pada pendidikan global dan budaya dunia (Choi, 2010).

Konsep teoritik yang dikemukakan di atas dengan sangat jelas bahwa di sebuah perguruan tinggi pemahaman tentang realitas keragaman tidak dapat dihindari. Sebuah keharusan dalam proses membangun sumber daya manusia yang dikeluarkan perguruan tinggi harus dapat menanamkan nilai-nilai keragaman yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, maupun dalam pergaulan masyarakat global. Pengelola perguruan tinggi sangat penting untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan kampus yang memiliki orientasi mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, di sisi lain juga seorang yang moderat dan pluralis.

3. Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Membangun Sumber Daya Manusia Moderat

Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah lembaga pendidikan sehingga peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik ras, etnis, dan kelompok kelas sosial dapat memperoleh pengalaman pendidikan yang sama. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap orang (Banks, 2015). Lembaga pendidikan Islam perlu menginternalisasikan konsep perbedaan di dalam budaya lembaga.

Syakur (2021) mengatakan bahwa pendidikan multikultural sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan multikultural akan dapat memberikan perannya secara maksimal kepada peserta didik dalam memberikan pembinaan mental, spiritual dan intelektual tanpa terkecuali dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan peradaban manusia.

Lebih lanjut Syakur (2021) menjelaskan bahwa penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia karena terjadi proses pengintegrasian antara etika agama, etika keilmuan, dan etika sosial. Lembaga pendidikan Islam merupakan pusat wadah persiapan bagi sumber daya manusia atau generasi Islam. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjalankan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam.

Kurikulum pendidikan Islam di perguruan tinggi belum berorientasi pada karakter manusia yang cinta damai, dan pemahaman yang terbatas di kalangan mahasiswa tentang implementasi karakter di lingkungan kampus. Pendidikan agama yang diberikan belum menerapkan pendidikan lintas agama, oleh karena itu, penting untuk mengelola perbedaan agama menjadi karakter cinta damai. Penguatan karakter mahasiswa cinta damai saat ini perlu dimaksimalkan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi (Saefulloh, 2019).

Kursus agama merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh semua mahasiswa untuk menjadi media strategis dalam menanamkan karakter cinta damai. Karakter cinta damai yang dimiliki mahasiswa merupakan benih toleransi antar umat beragama (Saefulloh, 2019). Di Amerika, pendidikan multikultural di perguruan tinggi sangat penting untuk mengurangi konflik sosial.

Halualani (2004) the authors examine the amount of intercultural interactions individuals have within a given time period as well as the nature of such contact (e.g., topic of discussion, location, duration, relationship context dalam penelitiannya mengemukakan sebagian besar kelompok (Kulit Hitam/Afrika Amerika, Kulit Putih/Amerika Eropa, dan Asia Amerika) terlibat dalam pola interaksi yang sempit dengan hanya satu kelompok ras/etnis besar lainnya dan bahwa sebagian besar interaksi antar

budaya terjadi di kampus, di kelas atau di luar kampus di lokasi kerja.

Temuan Halualani (2004) juga dipolakan berdasarkan: Kelompok ras/etnis tertentu yang terlibat dalam kontak, Lokasi kontak, Topik interaksi, dan Kelas sosial ekonomi. Tahap awal ini mengidentifikasi temuan penting, masalah, dan pertanyaan yang belum terjawab tentang interaksi antar budaya yang berkembang di universitas multikultural. Penelitian kontak antar budaya yang masih ada sejak tahun 1950-an, telah menghasilkan wawasan berharga tentang kondisi di mana kontak antar kelompok menguntungkan dan membantu mengurangi prasangka kelompok luar. Pendidikan yang berlangsung di perguruan tinggi akan membuat individu lebih berpeluang mengalami kontak budaya, ideologi dan beragam perbedaan.

Perguruan tinggi Islam merupakan sebuah lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang keahlian masing-masing. Namun di sisi lain para sarjana profesional telah dibekali mengenai konsep keragaman dalam budaya dan agama. Sehingga jika program pendidikan di pendidikan tinggi Islam berjalan baik, maka akan dapat mengeluarkan sumber daya manusia yang moderat. Terdapat berbagai problema yang dihadapi pengelola perguruan tinggi Islam dalam membangun sumber daya manusia Islam yang moderat, inklusif, dan pluralis (Sholehuddin, 2021). Tidak hanya berkontribusi dalam internalisasi nilai-nilai moderat, perguruan tinggi Islam khususnya dapat memberikan kontribusi riset-riset keberagaman.

Perguruan tinggi merupakan tempat berkembangnya riset, oleh sebab itu perlu pengembangan sumber daya manusia dengan orientasi jangka panjang (Nguyen, 2016). Perguruan tinggi Islam dapat melakukan riset-riset yang menghasilkan konsep teoritik dan praktik dari multikulturalisme dan moderasi beragama. Namun demikian untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan

dukungan kebijakan-kebijakan substantif agar dapat mendorong intensnya pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama.

D. Studi Relevan

Penelitian-penelitian relevan terkait pendidikan multikultural, moderasi beragama dan relasi dengan sumber daya manusia penulis tampilkan ringkasannya sebagai berikut.

Gloria (2004) meneliti perspektif global pendidikan multikultural serta bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat menggunakannya untuk tetap menjadi model keunggulan akademik dalam masyarakat pluralistik dan demokratis.

Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang menegaskan pluralisme budaya dalam budaya masyarakat yang beragam di dunia yang saling bergantung dan membutuhkan.

Di Amerika Serikat pendidikan multikultural dilakukan dengan perspektif asimilasi atau "*melting-pot*" dan perspektif pluralisme global. Perspektif global pendidikan multikultural mengakui pluralisme budaya sebagai keadaan ideal dalam setiap masyarakat yang produktif dan mempromosikan kesetaraan serta rasa hormat di antara kelompok budaya yang ada.

Dengan interkoneksi manusia yang meningkat pesat di antara semua negara. Terdapat masalah global terkait dengan ekosistem, senjata nuklir, terorisme, hak asasi manusia, dan sumber daya nasional yang langka. Institusi pendidikan tinggi perlu merangkul perspektif global multikultural jika sebuah negara ingin tetap menjadi masyarakat demokratis.

Perspektif asimilasi pendidikan multikultural adalah bahwa budaya mikro harus melepaskan budaya dan identitas asli mereka untuk berbaur atau diserap ke dalam budaya Anglo-Eropa Barat yang dominan. Prinsip ini memungkinkan perspektif global pendidikan multikultural untuk melampaui pedagogi kesetaraan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah yang telah diciptakan oleh perspektif asimilasi.

Perspektif global pendidikan multikultural memungkinkan promosi nilai-nilai multikulturalisme serta promosi kesetaraan di antara semua kelompok budaya dalam masyarakat. Perspektif global pendidikan multikultural memungkinkan individu untuk mengembangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap semua kelompok budaya yang ada (Ameny-dixon, 2004).

Leslie (2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perguruan tinggi harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bekerja dalam masyarakat global dan problem ini merupakan sebuah tantangan. Oleh sebab itu perguruan tinggi dapat menerapkan kurikulum yang memiliki perspektif multikultural. Inisiatif pengelola perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kurikulum multikultural yang kuat. Perubahan-perubahan kurikulum tradisional sangat penting dilakukan.

Dalam laporan penelitiannya Leslie (2003) menemukan beberapa hal inisiatif kurikulum multikultural di antaranya: sejarah inisiatif kurikulum; teknik yang digunakan untuk mendorong fakultas berpartisipasi dalam Lembaga Penelitian dan Transformasi Kurikulum Multikultural; Evaluasi fakultas dari Institut dan strategi pedagogis yang digunakan fakultas dalam transformasi program mereka serta tanggapan mahasiswa terhadap program yang diubah, serta rencana kurikulum untuk untuk masa depan.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjalankan pendidikan multikultural yang dapat dilakukan yaitu: Pertama, mendirikan Pusat Studi Multikultural dan Gender yang berada di garis depan inisiatif transformasi kurikulum multikultural universitas.

Kedua, transformasi Kurikulum Multikultural dan Lembaga Penelitian setelah tahun percontohan bekerja dengan empat anggota fakultas pada penelitian dan implementasi praktik terbaik insersi kurikulum multikultural. Direktur Pusat merencanakan dan menerima persetujuan universitas dan dukungan keuangan untuk Institut Transformasi Kurikulum Multikultural.

Ketiga, terdapat lembaga konsultan kurikulum yang dapat menjadi mediator bagi fakultas dalam merumuskan dan menjalankan kurikulum. Keempat, bahwa rekrutmen fakultas merupakan kunci keberhasilan dalam membuat fakultas di institusi berpartisipasi dalam proyek transformasi kurikulum multikultural. Kelima, pentingnya dukungan kelembagaan (Leslie, 2003).

Lawyer (2018) melakukan penelitian pendidikan multikultural di perguruan tinggi mengaitkannya dengan keadilan sosial. Bagi Lawyer, membicarakan pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dengan praktik keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam praktik pendidikan multikultural sangat penting untuk membongkar praktik ketidakadilan sosial.

Dalam melakukan penelitian tentang pendidikan multikultural, Lawyer (2018) menggunakan konsep pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Freire, (1970); Giroux, (2009); McLaren, (2003), yang mengulas bagaimana teori ras kritis dalam pendidikan. Konsep pendidikan multikultural dalam praktiknya masih menampakkan sikap ketidakadilan bagi kalangan disabilitas dan responsi terhadap keragaman budaya.

Yusupova (2015) melakukan penelitian sistematis untuk mengidentifikasi, membenarkan, dan mengelompokkan prasyarat- prasyarat teoretis dan praktis dari pembentukan hubungan budaya dan antar etnis antara siswa dalam lingkungan pendidikan multikultural lembaga pendidikan tinggi. Tujuan organisasi pendidikan antar budaya adalah kepekaan etno-budaya, yaitu pendidikan untuk memahami karakteristik budaya yang tepat dan kekhasan budaya asing.

Di Amerika Serikat, masalah yang relevan diselesaikan oleh Pusat Pendidikan Multikultural di Universitas Washington (Seattle), dipimpin oleh James Banks, Pusat Pendidikan Multikultural (BUENO) di Universitas Negeri Colorado (dipimpin oleh Leonard Baca), Stanford Pusat Program Pendidikan Internasional dan Lintas Budaya, Pusat Nasional Keanekaragaman Budaya di Santa Cree, Asosiasi Penelitian Pengembangan Antarbudaya di Texas, Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Multikultural, dipimpin oleh presiden Charles Grant dan Donna Goldnik. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan multikultural sangat penting untuk menyukseskan agenda program multikulturalisme.

Lingkungan pendidikan multikultural lembaga pendidikan tinggi dirancang untuk membantu orang-orang dari berbagai negara memasuki budaya mereka sendiri dan budaya orang lain melalui pengenalan nilai-nilai budaya, serta dialog budaya (Yusupova, 2015).

Praktik menunjukkan bahwa universitas yang menjadi subjek penelitian Yusupova tidak memerlukan teknologi, bentuk, metode yang terpisah untuk menciptakan budaya hubungan internasional. Tetapi sistem yang memadai untuk sifat dan isi budaya hubungan internasional mahasiswa. Pendidikan tinggi menghadapi masalah dan tugas kompleks yang terkait dengan pembentukan budaya hubungan internasional anak muda dalam lingkungan pendidikan multikultural.

Dalam konteks penelitian Yusupova (2015) kepentingan khusus diberikan pada penciptaan lingkungan pendidikan multikultural di universitas, yang memunculkan bidang pendidikan multikultural, di mana isinya adalah integrasi aspek antar budaya yang berisi disiplin ilmu yang dipelajari berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Parihala (2019) melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip kearifan lokal “orang basudara” dalam pendidikan tinggi di Maluku. *Orang basudara* merupakan konsep budaya lokal yang mengakui tentang budaya hidup bersaudara. Pendidikan *orang basudara* di satu sisi bertujuan untuk membentuk kapasitas intelektual manusia, dan di sisi lain, untuk membentuk karakter manusia yang menerima dan menghormati realitas pluralisme, serta akan berkontribusi untuk mengembangkan dan memelihara perdamaian di antara mereka. Masyarakat Maluku baru saja keluar dari konflik sosial membutuhkan media merekatkan kembali persaudaraan (Parihala, 2019).

Parihala (2019) melakukan studi di universitas yang pernah menjadi korban konflik, namun memiliki komitmen kuat untuk menjaga pendidikan *orang basudara* untuk membangun dan memelihara perdamaian di Maluku. Dalam proses membangun perdamaian di Maluku hingga saat ini, UKIM telah mengambil posisi untuk mempromosikan dirinya sebagai kampus *orang basudara* atau sebagai tempat pendidikan semua orang yang dianggap sebagai saudara.

Pendidikan *orang basudara* mengacu pada pola pengembangan penyelenggaraan pendidikan multikultural yang menghargai keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Teologi kultural, filosofis dan kontekstual *orang basudara* sebagai citra diri dan perekat masyarakat multikultural di Maluku, sengaja dilekatkan pada identitas eksistensial UKIM, untuk menunjukkan bahwa UKIM bukanlah lembaga eksklusif tetapi inklusif yang bersedia merangkul dan menghormati realitas

pluralitas. Dalam konteks konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang masih meresahkan kehidupan masyarakat majemuk, maka pendidikan multikultural menjadi kebutuhan penting untuk setiap universitas agar selalu menjaga perdamaian di Maluku.

Pewewardy dan Frey (2002) dalam penelitiannya mengukur kemajuan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan tinggi dalam mencapai akses dan kesempatan yang sama bagi semua orang Amerika. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada area dalam interaksi antara mahasiswa kulit berwarna dan mahasiswa kulit putih di mana kepemimpinan institusional dapat dilakukan secara efektif untuk memastikan iklim kampus yang menghargai keragaman.

Mahasiswa kulit putih dan mahasiswa kulit berwarna yang kuliah di universitas negeri yang didominasi kulit putih menjawab pertanyaan mengenai iklim rasial, layanan dukungan mahasiswa, kursus multikultural, dan persepsi serta sikap tentang keragaman budaya di kampus mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ada perselisihan yang berlangsung seputar isu-isu penting yang berdampak pada keragaman budaya di pendidikan tinggi.

Banyak mahasiswa yang kurang terwakili mengalami penurunan identitas, status, dan keamanan mereka saat mereka menempuh pendidikan tinggi. Contoh marginalitas ini dapat ditemukan dalam kejahatan rasial di kampus dan kampus universitas. Sementara kampus secara luas dipandang sebagai benteng pemahaman dan toleransi, pada saat penerimaan minoritas meningkat, jumlah kejahatan rasial menunjukkan sebaliknya (Pewewardy & Frey, 2002).

Sulhan (2018) mencermati eksistensi perguruan tinggi Islam di tengah dinamika tantangan sosial dan isu perubahan sosial yang cepat. Sulhan (2018) meneliti bagaimana Pendidikan Tinggi Islam (PTKIN) memainkan peran penting dalam konteks

dinamika perubahan, serta bagaimana menghadapi kekerasan dan fundamentalisme agama saat ini, dan apa akar dari kekerasan dan konflik agama.

Dalam temuannya dikemukakan bahwa universalisme dan keterbukaan khazanah Islam PTKIN menjadi acuan utama Islam yang terbuka, dinamis dan toleran. Islam yang berkembang di PTKIN menjadi kiblat perkembangan Islam di Indonesia.

Isu kekerasan atas nama agama, hubungan antar umat beragama yang saling mencurigai, demokrasi, HAM, dan perempuan merupakan isu keagamaan yang harus mendapat perhatian Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Meluasnya kekerasan atas nama agama dan kekerasan yang mengguncang kawasan dan dunia Islam juga menjadi perhatian. Perguruan tinggi Islam yang berada di bawah Kementerian Agama dan mulai berkembang dari tahun 1960 an telah menjadi lokomotif bagi pengembangan kajian keislaman (Sulhan, 2018).

Sholehuddin (2021) melakukan penelitian mengenai pendirian rumah moderasi beragama di IAIN Pekalongan. Rumah moderasi dinilai merupakan sarana internalisasi nilai-nilai Islam moderat. Selanjutnya program moderasi beragama diselenggarakan dengan pendekatan kontributif, pendekatan aditif, pendekatan transformatif, dan pendekatan sosial. Konsep yang dikembangkan di IAIN Pekalongan yaitu konsep Islam Wasathiyah atau Islam Moderat. Sholehuddin dalam penelitiannya menyarankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi basis laboratorium moderasi beragama melalui pendekatan sosial keagamaan dalam agama dan negara.

Penerapan moderasi beragama dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum mata kuliah dan terintegrasi ke dalam mata kuliah yang ada. Metode aplikasi moderasi beragama dilakukan dengan integrasi ilmu dengan ilmu agama sangat diperlukan agar generasi milenial mampu

mengembangkan ilmu dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam (Sholehuddin, 2021).

Konsep moderasi beragama di IAIN Pekalongan mengacu pada arah kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B-3663.1/Dj.I/BA .02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Surat Edaran Rumah Moderasi Keagamaan di kampus PTKIN (Sholehuddin, 2021). Dengan adanya rumah moderasi beragama di kampus IAIN Pekalongan akan menjadi tempat pendidikan, penguatan konsep moderasi beragama.

Mahyuddin (2020) melakukan penelitian tentang peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dalam merawat toleransi sosial dan moderasi beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi konflik agama masa lalu memengaruhi toleransi sosial dan moderasi beragama dalam masyarakat. Dalam upaya meretas perbedaan dan antagonisme di dalam masyarakat, masyarakat Ambon semakin terbuka diubah menjadi “kerukunan hidup” dan keluar dari dunia “kecurigaan dan permusuhan” meskipun hubungan kelompok-kelompok penganut agama masih menyimpan potensi kuat berulangnya gesekan sosial yang melibatkan dua kelompok agama. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon merupakan modal penting dalam meringkai harapan baru perdamaian tersebut.

Mahyuddin (2020) menjelaskan bahwa kehadiran ARMC-IAIN Ambon dalam menjalankan berbagai programnya sebagai Pusat Rekonsiliasi dan Mediasi di Maluku telah memfasilitasi penguatan dan sosialisasi ide serta program perdamaian di masyarakat. Melatih anak-anak muda menjadi “agen perubahan” dan memediasi konflik. Mereka aktif melakukan advokasi-advokasi pendidikan perdamaian dan kegiatan sosial keagamaan bernuansa kampanye toleransi dan moderasi, sebuah

wadah perjumpaan antar lintas kelompok agama yang turut memengaruhi terciptanya kohesi sosial antara umat Islam dan Kristen.

Kemudian berdirinya Pusat Studi antar Budaya dan Agama (PSaBA), misalnya, kampus ini menawarkan program-program yang menysasar masyarakat umum terutama yang berlatar belakang identitas sosial yang berbeda dalam mewujudkan toleransi beda agama. Dalam rangka pengelolaan keragaman dalam kemajemukan serta mempromosikan diri sebagai kampus “harmoni dalam perbedaan”, di beberapa kesempatan, PSaBA IAKN Ambon mengggagas workshop sekolah multikulturalisme pemuda lintas agama (Mahyuddin, 2020).

Terlihat dengan jelas bahwa antara IAIN Ambon dan IAKN Ambon tidak hanya menyediakan forum alternatif pemuda-pemudi kota Ambon dalam merespons realitas bermasyarakat yang eksklusif, tetapi juga turut serta mendorong persaudaraan masyarakat secara umum dalam bingkai penguatan pendidikan multikultural dan pluralisme agama. Upaya-upaya ini memiliki peran signifikan bagi terpeliharanya semangat keberagaman di Maluku tanpa menafikan peran pemerintah dan stakeholder lainnya yang tidak pernah berhenti mengupayakan terbentuknya keharmonian sosial antar pemeluk agama di kota Ambon (Mahyuddin, 2020).

Berdasarkan tinjauan studi relevan di atas, terdapat banyak penelitian tentang pendidikan multikultural dan moderasi beragama dalam konteks lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan multikultural sangat penting untuk mengatasi persoalan segregasi sosial, ketidakadilan sosial dan persoalan diskriminasi. Sedangkan penelitian tentang moderasi beragama di pendidikan tinggi merupakan upaya untuk melihat bagaimana upaya perguruan tinggi dapat mengatasi persoalan ekstrimisme dan radikalisme beragama yang dapat memicu berbagai kekerasan mengatasnamakan agama.

Namun demikian dalam penelitian ini, penulis mencoba mengintegrasikan kajian sumber daya manusia ke dalam isu-isu multikultural dan moderasi beragama. Tesis penulis, bahwa perguruan tinggi Islam merupakan wadah persiapan sumber daya manusia yang profesional, namun di sisi lain juga dapat mempersiapkan sumber daya manusia moderat yang memiliki pandangan pluralis dan inklusif. Oleh sebab itu penelitian ini memberikan kontribusi kepada kajian sumber daya manusia mengenai pentingnya memiliki perspektif pengelolaan sumber daya manusia yang moderat dan pluralis. Sebagaimana dikembangkan di perguruan tinggi Islam. Namun demikian, dalam usaha membangun sumber daya manusia moderat dan pluralis, perguruan tinggi Islam harus menghadapi banyak tantangan. Persoalan dan solusi menghadapi kendala yang dihadapi tersebut menjadi temuan baru untuk kajian sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi Islam.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multikasus. Metode kualitatif sangat relevan digunakan untuk menggali makna terhadap sebuah peristiwa (Creswell, 1998). Sedangkan pendekatan multikasus digunakan karena dalam penelitian ini memilih perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang memiliki kasus berbeda sebagaimana disarankan oleh Creswell (Creswell, 2012).

Penelitian studi kasus yang peka kontekstual dan baik secara teoritis dapat berkontribusi tidak hanya pada penerapan dan revisi teori yang ada tetapi juga pada pengembangan teori baru. Kasus ini dengan demikian menyediakan perhubungan yang berpotensi generatif untuk keterlibatan teori, konteks, dan penelitian (Rule & John, 2015).

Sebagaimana dianjurkan oleh Yin (2009) dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan kasus-kasus yang terjadi di: IAIN Manado dan IAIN Salatiga dipilih karena mewakili sebuah kota yang tingkat toleransi. Sedangkan IAIN Ambon dan IAIN Solo merupakan sebuah perguruan tinggi Islam negeri yang berada di sebuah daerah dengan tingkat konflik keagamaan yang tinggi dan pernah mengalami sebuah konflik keagamaan yang besar dan memakan banyak korban jiwa. Pendekatan multikasus digunakan karena terdapat perbedaan kasus antar tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Rule dan John (2015) mengatakan bahwa dua pendekatan yang ada untuk menghubungkan studi kasus dan teori, pendekatan pembangunan teori induktif (teori untuk kasus) dan deduktif, pendekatan pengujian teori (teori dari kasus), dan mengusulkan pendekatan dialogis dua arah. Penggunaan teori tidak hanya membutuhkan pemahaman rinci tentang teori itu sendiri, penerapan teori, dan interpretasi fenomena dalam terang teori, tetapi juga refleksi kritis pada proses ini. Sebuah pendekatan dialogis terhadap teori memahami bahwa "teori" itu. Hubungan khusus antara teori, praktik, dan penelitian akan dibentuk oleh konteks di mana mereka berada. Dengan yang dikemukakan oleh Rule dan John (2015) peneliti akan dapat melihat teori dan hasil penelitian yang akan dapat bermanfaat untuk mengembangkan praktik.



Gambar 1. Penulis melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di UIN Raden Mas Said Solo

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengadakan observasi langsung di empat kampus: IAIN Salatiga, UIN Mas Said Solo, IAIN Manado, dan IAIN Ambon. Peneliti mencermati dan mencatat kondisi interaksi warga kampus dan keadaan umum seperti keberadaan Taman Moderasi Beragama di UIN Mas Said Solo. Kemudian data dikumpulkan dengan melakukan focus group discussion, peneliti mengundang informan sebanyak 10 orang dari berbagai elemen. Di UIN Solo *focus group discussion* dihadiri para peneliti tentang gerakan

Islam, Pegiat Gerakan Islam Santun, mantan aktivis mahasiswa yang pernah terlibat konflik dengan gerakan Islamisme.



Gambar 2. *Focus Group Discussion* (FGD) di Manado bersama para akademisi dan aktivis lintas agama

Sedangkan di IAIN Manado penyelenggaraan FGD diselenggarakan dengan mengundang berbagai kalangan: peneliti gerakan Islam, tokoh Ahmadiyah, Pendeta, Aktifis Nahdlatul Ulama, Aktifis Muhammadiyah, Aktifis Syiah, dan kalangan akademisi di IAIN Manado. Sementara di IAIN Ambon dan IAIN Salatiga peneliti lebih memilih wawancara mendalam dengan mengunjungi peneliti dan akademisi IAIN Salatiga, dan tokoh NGO yang terlibat dalam kegiatan multikultural di IAIN Salatiga. Terakhir di IAIN Ambon peneliti melakukan wawancara dengan *snowball sampling*, informan diwawancara secara bergulir setelah mendapatkan informasi dari informan yang diwancarai. Di IAIN Ambon peneliti mewawancarai para pegiat perdamaian di Ambon, dan kalangan gerakan Islam yang pernah terlibat konflik Islam dan Kristen di Ambon. Agar dapat menjaga privasi dan keamanan informan, maka dalam pelaporan dan penyajian hasil penelitian, nama informan dalam penelitian ini diberi anonim.



Gambar 3. Penulis melakukan wawancara bersama Ketua LPPM IAIN Ambon

Dalam melakukan studi kasus Creswell (Creswell,2012) menganjurkan untuk menyelesaikan setiap kasus terlebih dahulu. Penulis terlebih dahulu melakukan penelitian di UIN Radem Mas Said Solo, dilanjutkan ke IAIN Salatiga, kemudian ke IAIN Manado, dan terakhir di IAIN Ambon.



Gambar 4. Penulis di Papan Selamat Datang IAIN Ambon



BAB 4

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Eksistensi PTKIN : Kondisi Multikultural dan Pertarungan Ideologi

UIN Mas Said Solo dan Genealogi Gerakan Islam

Kota Solo dikenal sebagai kota yang sangat marak gerakan Islamisme dan sering terlibat dalam gerakan Islam politik. Salah satu sorotan media nasional maupun internasional terhadap Kota Solo, salah satunya adalah karena keberadaan dan pergerakan yang dilakukan oleh Abu Bakar Basyir di Pesantren Ngruki (ZN, wawancara, Solo, 2021). Secara historis, Solo memiliki genealogi pergerakan Islam.

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, Solo juga merupakan markas besar Hizbullah yang bisa dianggap sebagai genealogi kenapa Solo hingga saat ini menjadi basis gerakan Islamisme (AL, wawancara, Solo 2021). Hingga masa Indonesia pasca reformasi, Kota Solo juga menjadi sorotan terhadap gerakan Islam politik.

Muhammad (2021) menjelaskan bahwa sikap politik aktivis Islam dan kalangan Islamis mengkristal dalam sebuah tindakan sebagai ekspresi untuk memperlihatkan identitas ke-Islaman mereka yang berada di tengah berjalannya demokrasi liberal modern di

Surakarta. Gerakan kalangan Islamis ini dapat dipahami sebagai sebuah perlawanan tersembunyi atau *soft resistance* terhadap praktik demokrasi liberal.

Di Solo dapat dikatakan tidak terdapat sebuah organisasi Islam yang benar-benar mayoritas dan mendominasi secara jumlah anggota maupun hegemoni wacana keagamaan. Organisasi keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga tidak memiliki pengaruh dominan. Di Kota Solo terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan Islam seperti Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), dan aliansi-aliansi gerakan Islamisme seperti: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (wawancara, Solo 2021).

Munculnya gerakan Islam radikal di Solo dimulai pada tahun 70-an, pada masa tersebut dikenal di antaranya Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basyir (wawancara, Ambon, 2021). Gerakan Islamisme yang dipimpin para tokoh Islamis ini, membuat Solo sering menjadi sorotan terjadinya kecurigaan hubungan antar umat beragama.

Kecurigaan antar umat Islam dan Kristen hingga saat ini masih terjadi. Sebagai salah satu kasus, persoalan perebutan tahta Keraton Solo yang ketika penelitian ini dilakukan masih terjadi konflik perebutan kekuasaan. Diindikasi oleh kelompok Islamis bahwa dalam konflik perebutan kepemimpinan Keraton Solo, terdapat peran kelompok Kristen dan adanya motif menguasai Keraton Solo dengan tujuan untuk melakukan kristenisasi (AL, wawancara, Solo 2021). Persoalan tahta Keraton ini pun berdampak kepada relasi antar internal organisasi Islam.

Kelompok Islamis menuding bahwa organisasi kemasyarakatan Islam, Nahdlatul Ulama berperan dalam persoalan konflik di Keraton Solo. Karena NU memiliki relasi erat dengan pihak Keraton Solo (AL, wawancara, Solo 2021). NU yang sering berbeda pandangan dan sikap dalam persoalan sosial

dan politik, sering dituduh terlampaui dekat dengan kalangan Non Muslim daripada sesama kelompok Muslim atau organisasi Islam sendiri. Hingga gerakan-gerakan Islamisme dipilih sebagai tandingan dari gerakan organisasi kemasyarakatan mainstream seperti Nahdlatul Ulama.

Fenomena Islamisme semakin menguat ketika gerakan Islam seperti Fron Pembela Islam (FPI) mulai menampilkan aktivitas dengan menampilkan wajah Islam yang keras. Salah satu contohnya adalah pemaksaan masuk Islam dan menghalangi praktik kebudayaan lokal. Pada tahun 2017 Masjid Agung Solo mulai kehilangan wajah kultural dengan sulitnya menyelenggarakan ritual budaya *sekaten* (AL, wawancara, Solo 2021).

Persoalan multikultural mengalami kompleksitas dengan semakin munculnya organisasi kemasyarakatan yang juga menampilkan radikalisme versi mereka sendiri, seperti Setia Hati Terate (AL, wawancara, Solo 2021). Infoman mengatakan kemunculan organisasi seperti Setia Hati Terate, yang pada dasarnya merupakan perguruan silat ini akhirnya masuk ke dalam perebutan lahan parkir. Namun demikian informasi dari mengenai Setia Hati Terate tidak berdampak pada gerakan-gerakan anti multikultural. Permasalahan keberagaman muncul lebih disebabkan karena maraknya bentuk-bentuk gerakan Islamisme.

Solo juga merupakan basis kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) dan juga Dewan Dakwah DDII yang pernah didirikan oleh M. Natsir (sekarang LDII). Berbagai bentuk kontestasi muncul di antara kelompok-kelompok Islam, salah satunya adalah pertarungan wacana yang dapat dilihat dengan sangat intens dan meluas. Masing-masing kelompok melakukan dakwah melalui berbagai media, salah satunya adalah radio.

Kelompok MTA melakukan siaran dakwah lewat radio selama 24 jam, walau yang disampaikan dalam ceramah di radio adalah rekaman. Uniknya, rekaman ceramah dibuat seakan-akan sedang berlangsung. Salah satu tujuan format ini dibuat agar dapat lebih menarik pendengar, sehingga tidak beralih ke siaran dakwah lainnya. Sehingga dapat dikatakan kontestasi ideologi antar organisasi Islam berlangsung secara 24 jam (AL, wawancara, Solo 2021).

Pertarungan ideologis di Solo termanifestasi dalam interaksi individu anggota organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya, setiap anggota keagamaan dianjurkan hanya melakukan transaksi jual beli kepada sesama anggota mereka. Oleh sebab itu di Solo akan dapat ditemukan warung-warung yang memiliki kode berbentuk angka, untuk MTA diberi kode 234, dan LDII dengan kode 354.

Sehingga dalam transaksi jual beli dapat dijamin bahwa anggota MTA hanya berbelanja di warung sesama MTA, begitu juga dengan LDII (AL, wawancara, Solo 2021). Tujuan adanya transaksi belanja sesama anggota ini adalah bentuk militansi perjuangan ideologi, karena salah satu faktor yang menghambat penyebaran dakwah adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok Islam adalah memperkuat ekonomi anggota mereka yang kebanyakan adalah masyarakat kecil. Organisasi Islam *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama, pada kasus Solo dinilai gagal dalam mengembangkan perekonomian masyarakat kecil, yang pada dasarnya merupakan basis massa NU. Pengurus NU dianggap kurang memperhatikan aspek pembangunan ekonomi jemaahnya, sehingga sangat rentan dan gampang bagi jemaah untuk tergoda dengan gerakan ideologis Islam yang bergerak berdasarkan ekonomi rakyat.

Keberadaan IAIN Salatiga di Kota Toleransi Tertinggi

IAIN Salatiga berada di Kota Salatiga yang memiliki tingkat toleransi berada di nomor 1 versi survei Setara Institute (2020). Kehidupan antar umat beragama khususnya Islam dan Kristen relatif sangat harmonis. Sebuah keluarga bisa saja terdapat tiga agama yang berbeda dan hal tersebut merupakan sebuah kelaziman (Percik, wawancara 2021).

Walaupun hasil riset Setara Institute di Salatiga merupakan kabar baik, namun aktivis Lembaga Percik yang berkantor di Kota Salatiga dan berkegiatan dalam isu multikultural mengingatkan bahwa percikan-percikan ketegangan dan potensi konflik keagamaan sangat mungkin terjadi (Wawancara aktivis Percik, Salatiga, 2021). Oleh sebab itu, keberadaan dua perguruan tinggi yang berbasis agama di Salatiga sangat berperan penting dalam mendinamisir kehidupan harmonis di masyarakat. Universitas Kristen Satyawacana (UKSW) sebagai perwakilan dari kalangan Kristen, dan IAIN Salatiga merepresentasikan kelompok masyarakat Muslim.



Gambar 5. Penulis di depan Gedung K.H. M. Hasyim Asy'ari IAIN Salatiga

Kerukunan antar umat beragama, sebelumnya harus dapat dibangun mulai dari kerukunan internal umat beragama. Cermin kerukunan internal antar organisasi keIslaman di IAIN Salatiga dapat dilihat dengan keberadaan dua gedung besar yang menggunakan nama dua tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah.

Gedung rektorat diberi nama Gedung KH. Hasyim Asyari, sedangkan gedung yang di dalamnya terdapat Pascasarjana diberi nama Gedung KH. Ahmad Dahlan (Observasi, Salatiga 2021). Penamaan gedung dengan para tokoh NU dan Muhamadiyah merupakan sebuah artikulasi sikap dan usaha untuk mencari titik temu di kalangan internal umat Islam, khususnya yang ada di dalam kampus. Hal ini mencerminkan budaya dialogis antar keyakinan di Salatiga.

Di Salatiga perbedaan agama dianggap sebagai modal kultural yang bukan menghambat terjadinya hubungan harmonis antar warga yang berbeda agama. Sehingga secara kultural di Salatiga masyarakat saling menghargai dengan bentuk saling terlibat, saling bantu dalam momen-momen keagamaan, yang dilakukan tanpa menggoyahkan aqidah atau keyakinan individu masyarakat.

Ketika bulan Ramadhan, masyarakat Kristen biasa menyediakan menu berbuka puasa untuk umat Islam. Begitu juga sebaliknya ketika umat Kristen merayakan Natal dan Perayaan Paskah, masyarakat Muslim turut membantu dan menjaga perayaan Natal (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021). Sikap toleransi dengan penuh kesadaran dijaga oleh masyarakat Solo dengan berupaya mencegah pengaruh-pengaruh dari luar daerah yang akan merusak kehidupan harmonis.

Kondisi Salatiga sebagai kota tingkat toleransi tertinggi yang secara geografis dekat dengan Kota Solo sebagai basis gerakan Islamisme tidak mempengaruhi suasana toleransi antar umat

beragama. Memang terdapat pergerakan kelompok Islamis seperti FPI dan HTI ada. Namun Aktivisme kelompok Islamis hanya dapat bergerak secara senyap dan tidak terlampau berani untuk *show up* di muka publik Solo. Kelompok Islamis tidak berani menunjukkan kekuatan dalam bentuk jumlah massa atau sekedar memiliki sekretariat di Kota Salatiga (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021).

Tidak munculnya secara terang-terangan aktivitas kelompok Islamis terjadi karena terdapat antisipasi dan resistensi masyarakat Salatiga terhadap gerakan Islamisme yang menampilkan wajah Islam yang penuh amarah dan sikap intoleran. Selain itu juga karena terdapat kontribusi penting dari organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai penggerak dan penjaga kerukunan antar kehidupan umat beragama di Salatiga (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021).

Keberadaan organisasi kemasyarakatan Islam berbasis nasionalis dan Keindonesiaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat jelas turut mengantisipasi gerakan Islamis intoleran. NU dan Muhammadiyah secara aktif mendinamisir hubungan antar umat beragama dan sikap toleransi beragama, dengan menarasikan pentingnya semangat untuk hidup berdampingan untuk menjaga keberagaman. Jika terdapat percikan konflik kecil di masyarakat, segera dilakukan antisipasi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin politik daerah (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021).

Namun demikian di Salatiga, beberapa kasus gesekan konflik antara umat Islam dan Kristen pernah terjadi. Misalnya, pada kasus pembongkaran mesjid yang berada di wilayah umat Kristen. Peristiwa ini sempat memunculkan percik konflik, namun segera dapat diantisipasi agar tidak meluas (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021). Peran lembaga antar iman sangat penting dalam memediasi konflik.

Konflik bernuansa keagamaan di Salatiga secara historis pernah terjadi di tahun 2006. Asal mula konflik yang hampir memunculkan tindakan anarkis, karena terkait hak guna pakai tanah peninggalan Belanda yang dipakai oleh kalangan misionaris. Hak guna pakai ini telah berlangsung selama 50 tahun. Umat Islam ingin menguasai (kembali) tanah tersebut, namun keinginan tersebut diketahui oleh kalangan Kristen dan memikirkan dampaknya. Bagi kelompok Kristen, jika apa yang diminta oleh kalangan masyarakat Islam diberikan maka konsekwensinya adalah kalangan agama lain pasti akan ikut meminta bagian tanah tersebut. Sebagai negosiasi dan untuk meredam konflik meluas atas tuntutan tersebut maka dibuat sebuah kesepakatan. Kelompok Islam di Salatiga mendapat kompensasi dengan diberikan akses untuk pendirian Mesjid (wawancara DU, Salatiga, 2021). Data dari informan ini sedikit menggambarkan bahwa di Salatiga hegemoni Kristen sangat kuat.

Pasca peristiwa konflik lahan yang didasarkan sentimen keagamaan tersebut menyebabkan munculnya kesadaran para tokoh lintas agama. Para tokoh lintas agama kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan membentuk sebuah forum bernama Majelis KUASA. Organisasi ini kemudian menjadi benih terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun demikian dalam perkembangannya keberadaan FKUB dinilai para kalangan agamawan belum mencukupi sehingga kemudian juga dibentuk Forum Agamawan Muda Lintas Iman (wawancara DU, Salatiga, 2021).

Informan penulis yang beraktivitas di organisasi Percik memberikan peringatan bahwa kedamaian dan toleransi yang tinggi di Salatiga ini bisa saja akan berubah menjadi konflik jika mulai dari awal tidak dibina dan dijaga secara serius oleh pemerintah daerah dan masyarakat berbagai kalangan. Kelompok-kelompok ekstrim tetap terus berupaya untuk dapat masuk dan

beraktivitas di Salatiga. Berbagai elemen seperti perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi Kristen yang berkembang di Salatiga diharapkan dapat secara progresif menjalin dialog dan kerjasama. Sehingga keharmonisan dapat dilihat dari masyarakat bawah hingga kalangan elit.

IAIN Manado Berdiri di Daerah Mayoritas Kristen

Posisi IAIN Manado berada di Kota Manado yang memiliki ranking sebagai kota tingkat toleransi tertinggi (Setara, 2020). Mayoritas masyarakat Manado menganut agama Kristen, dan kemudian diikuti oleh pemeluk agama Islam. Hubungan antar pemeluk agama di Manado dapat dikatakan cukup harmonis. Indikator keharmonisan dan toleransi beragama dapat dilihat dari sebuah keluarga di Manado tidak terlampau mempersoalkan keberadaan anggota keluarga jika terdapat menganut agama yang berbeda (Wawancara AL, Manado 2021).



Gambar 6. Gedung Rektorat IAIN Manado

Di Manado bangunan-bangunan gereja nampak berdiri dengan tidak terlampau jauh jarak antar gereja. Informan mengatakan banyaknya gereja dengan jarak berdekatan tersebut karena adanya denominasi gereja penganut Kristen yang berbeda (observasi dan wawancara, Manado, 2021).

Sebagai kota dengan mayoritas penganut Kristen, secara sangat jelas simbol-simbol kekristenan dapat dilihat di setiap sudut kota Manado. Mulai dari “Patung Yesus Memberkati” yang berdiri tinggi dan sangat megah. Patung Yesus Memberkati didirikan oleh pengusaha Real Estate Ciputra, inisiator pendirian berharap dengan keberadaan patung ini maka Manado akan menjadi kota yang diberkati.



Gambar 7. Salah satu penulis berpoto di bawah Patung Yesus Memberkati

Bahkan menurut Ciputra, Patung Yesus Memberkati berdiri menghadap Kantor Gubernur Sulawesi Utara dengan titik fokus ke ruang kerja Gubernur (observasi dan kompas.com). Pendirian Patung Yesus Memberkati sempat mendapatkan respon resistensi yang kuat dari kelompok Islam. Beberapa kelompok Islam menyampaikan protesnya dengan argumentasi, bahwa Patung Yesus Memberkati berada di sebuah perumahan, dan kenapa

harus dihadapkan ke Kota Manado. Kecurigaan kelompok Islam bahwa patung ini merupakan simbol penguasaan kelompok Kristen yang ingin menghegemoni Manado dengan Kristenisasi total.

Semangat Kristen di Manado dicerminkan dari gagasan dan kebijakan-kebijakan Gubernur Sulawesi Utara. Salah satunya adalah dengan (wacana) mencanangkan Kota Manado sebagai Kota Do'a. Oleh informan dikatakan bahwa begitu kuatnya hegemoni simbolik yang nampak jelas di Manado tersebut seperti api dalam sekam yang bisa saja menjadi celah untuk memicu terjadinya konflik keagamaan, khususnya Islam dan Kristen (wawancara, AM, Manado 2021).

Dalam diskusi di FGD muncul sebuah pernyataan bahwa perdamaian antara Islam dan Kristen bisa jadi merupakan “perdamaian semu”, karena kelompok Islam yang secara jumlah lebih sedikit dari kelompok Kristen lebih memilih diam, karena memang telah kalah dalam aspek jumlah yang juga berdampak pada momen-momen politik yang dapat memunculkan tokoh Islam. Dalam kondisi tersebut, maka pilihan untuk hidup berdampingan bisa dianggap lebih rasional daripada secara keras untuk memperjuangkan identitas keagamaan yang justru akan memiliki dampak buruk.

IAIN Ambon: Segregasi Sosial dan Ingatan Konflik Islam vs Kristen

IAIN Ambon berada di Kota Ambon, sebuah kota yang mayoritas masyarakat memeluk agama Kristen, dan kemudian diikuti jumlah penduduk agama Islam. Kota Ambon pernah mengalami konflik antara Islam dan Kristen yang banyak memakan korban jiwa. Tidak terdapat jumlah angka yang pasti mengenai korban jiwa, salah satu cara untuk mengatasi konflik Ambon adalah dengan melakukan segregasi.

Pemukiman masyarakat Ambon dibangun dengan konsep segregasi spasial, dengan adanya pembagian pemukiman masyarakat beragama Islam, dan pemukiman yang masyarakatnya beragama Kristen (Observasi, Ambon, 2021). Segregasi sosial antara umat Islam dan Kristen ini pada dasarnya sudah terjadi pada masa kolonial Belanda, dan semakin nampak pasca konflik Ambon (AM, Wawancara, Ambon, 2021).



Gambar 8. Gereja Silo berada di Pusat Kota Ambon

Kampus IAIN Ambon berada di daerah dataran tinggi di kawasan bernama Batu Merah yang merupakan sebuah kawasan Muslim, dan pada masa konflik Ambon daerah Batu Merah merupakan salah satu basis pertahanan umat Islam. Untuk menuju ke kampus IAIN Ambon bisa ditempuh dengan naik angkot dengan dua kali apabila dari Kota Ambon, dan jika menggunakan *Go Car* dapat ditempuh sekitar 20 menit dengan biaya Rp. 60.000 (Observasi, Ambon, 2021).



Gambar 9. Salah satu grafiti di sudut kota kawasan Muslim

Trauma terhadap konflik masih menyisakan kecurigaan-kecurigaan di antara masyarakat Muslim dan Kristen. Konflik-konflik kecil masih terjadi di garis batas pemukiman Muslim dan Kristen. Kewaspadaan tetap dijaga jika suatu saat konflik kembali terjadi (AN, wawancara, Ambon, 2021). Sebagai bentuk kewaspadaan dan kecurigaan, informan mengatakan bahwa di balik pintu rumahnya tersedia senjata tajam yang setiap waktu dapat digunakan jika tiba-tiba konflik kembali terjadi.

Perdamaian yang masih menyimpan api dalam sekam di Ambon membutuhkan solusi yang komprehensif agar sikap saling kecurigaan dapat dihilangkan dan kembali ke pada masyarakat Ambon yang saling bersaudara tanpa memandang perbedaan agama.

2. PTKIN, Sumber Daya Manusia Moderat dan Pluralis: Media dan Impementasi

Dalam temuan-temuan terkait pendidikan multikultural dan moderasi beragama, penulis tidak terfokus pada pengertian operasional yang kaku misalnya adanya mata kuliah “Pendidikan Multikultural” atau Mata Kuliah Moderasi Beragama. Namun penulis lebih mencari bagaimana nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama diartikulasikan dalam berbagai bentuk di UIN Raden Mas Said Solo, IAIN Salatiga, IAIN Manado, dan IAIN Ambon.

UIN Raden Mas Said Solo memiliki visi Menjadi Universitas Islam Unggul dan Inovatif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Maju Berkeadaban pada 2034. Sedangkan Misi UIN Raden Mas Said Solo, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran keilmuan keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan lokalitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju yang berkeadaban.
- b. Mengembangkan tradisi ilmiah melalui penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Meningkatkan kontribusi universitas bagi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat.

Tujuan UIN Raden Mas Said Solo, sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan profesional dalam bidang keislaman, sains, teknologi dan seni yang berkarakter ibadurrahman.

- b. Menghasilkan temuan-temuan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menghasilkan produk-produk pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memperluas kemitraan strategis nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk penguatan layanan dan kontribusi universitas (<https://uinsaid.ac.id/id/visi-misi>)

Di UIN Raden Mas Said Solo salah satu kegiatan penting implementasi pendidikan multikultural adalah terdapatnya media *online* “Islam Santun” yang dipelopori para akademisi dan dosen. Informan menjelaskan bahwa media *online* Islam Santun hadir sebagai respon terhadap pertarungan ideologis antara kelompok moderat dan Islamis yang terjadi di dunia maya. Sebagai wacana tandingan, maka para akademisi UIN Raden Mas Said Solo merasa perlu untuk menarasikan Islam yang ramah dan santun. Dalam situs resmi Islamsantun.org, dijelaskan sebagai berikut:

“Islamsantun.org adalah situs resmi yang dibuat oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara (PKPPN) IAIN Surakarta. Website ini dibuat sebagai tindak lanjut dari kampanye Literasi Islam Santun dan Toleran (LISAN) yang digaungkan PKPPN IAIN Surakarta sejak 2018. Sejak Januari 2021, PKPPN bertransformasi menjadi Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) IAIN Surakarta Dalam rangka memperluas peran, kontribusi dan jaringan (Islamsantun.org, Diakses tanggal 06 Januari 2022).

Media *online* Islam Santun ingin menyiarkan nilai-nilai Islam moderat. Konten yang dipublikasi oleh Islam Santun bisa berbentuk berita-berita tentang multikultural dan moderasi beragama, opini dan wacana-wacana mengenai Islam moderat,

sebagaimana dijelaskan di website resmi Islamsantun sebagai berikut.

“Islamsantun.org ingin menjadi rujukan pengetahuan keislaman yang menonjolkan nilai-nilai moderat dan santun dalam beragama. Dalam KBBI, santun adalah halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); sabar dan tenang; sopan. Dengan kata lain, Islamsantun.org adalah ruang yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Sebagai media keislaman nirlaba yang dikelola oleh PPM-PIN UIN Raden Mas Said Surakarta, Islamsantun.org siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menyuarakan perdamaian dan sikap moderasi beragama (Islamsantun.org, diakses tanggal 6 Januari 2022).

Islam Santun juga aktif di media sosial seperti Instagram yang memiliki konten kutipan kata-kata bijak dan sejuk tentang ajaran Islam yang damai serta menyejukkan. Pengelola Islam Santun juga berjejaring dengan jurnalis mediaonline yang menggarap isu-isu keragaman dan toleransi.

Islam Santun bergerak dengan menyebarkan narasi-narasi multikultural, perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama dengan artikel, berita, serta kutipan-kutipan tentang pentingnya toleransi dan adanya keberagaman di masyarakat melalui *flyer-flyer* yang disebar melalui media sosial instagram, facebook, dan twiter.

Dalam menjalankan visi multikultural dan moderasinya Islam Santun memiliki aliansi dengan media-media Islam yang menyiarkan multikultural dan bersatu dalam JITU (Jurnalis Islam Bersatu). Pilihan untuk aliansi dengan berbagai mediaonline yang memiliki visi moderat ini dirasa penting agar apa yang diperjuangkan pengelola Islam Santun dapat lebih mudah menyebar dan mendapatkan respon secara meluas.



Gambar 10. Mediaonline Islam Santun UIN Raden Mas Said Solo

Namun demikian kerja yang dilakukan oleh para pengelola Islam Santun saat ini masih menjadi inisiatif dari personal dosen. Program mediaonline Islam Santun belum menjadi kebijakan pimpinan perguruan tinggi.

Visi IAIN Salatiga dapat dilihat sebagai berikut: “Menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan mahasiswa dan masyarakat luas dalam mengoptimalkan potensi agar menjadi pribadi yang berkepribadian sehat, berkualitas dan berprestasi melalui pendekatan psikologis dan religius.” Sedangkan jika dilihat misi IAIN Salatiga, yaitu:

- a. Memberikan layanan pada seluruh civitas akademika IAIN Salatiga dan masyarakat umum dalam menyelesaikan problematika psikologis-religius.
- b. Memberikan pendampingan pada seluruh civitas akademika IAIN Salatiga dan masyarakat umum dalam menumbuhkan-kembangkan potensi diri.
- c. Membantu instansi-instansi pemerintah dan swasta untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- d. Membantu perusahaan maupun organisasi untuk meningkatkan produktifitas kerja (<https://iainsalatiga.ac.id/web/visi-misi/>).

Di IAIN Salatiga pendidikan multikultural dilakukan dengan berbagai media. Pusat moderasi beragama adalah salah satu sarana untuk melakukan *mainstreaming* moderasi beragama. Namun demikian pusat moderasi beragama dirangkap jabatan sekaligus oleh ketua LPPM UIN Salatiga (wawancara ketua LPPM, Salatiga, 2021).

Kontribusi kampus IAIN Salatiga dalam isu multikultural di antaranya: banyak dosen UIN Salatiga yang menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Melalui FKUB para akademisi IAIN Salatiga dapat memberikan kontribusi untuk menjaga keragaman di Salatiga. Peran dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam sangat penting sebagai strategi pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama.

Bentuk-bentuk keterlibatan IAIN Salatiga dalam isu multikulturalisme dan moderasi beragama di antaranya: Pertama, keterlibatan dosen IAIN Salatiga tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang berbasis nasionalisme dan keindonesiaan; Kedua, keterlibatan secara aktif ketika terdapat momen politik nasional maupun daerah dalam penyuluhan tentang tetap pentingnya menjaga kerukunan di momentum politik elektoral.

Ketiga, keterlibatan dosen IAIN Salatiga dalam khotbah Jum'at dan menyampaikan tema-tema toleransi dan kerukunan antar umat beragama; Keempat, keterlibatan dosen dalam pengajian-pengajian keagamaan yang berlangsung di masyarakat; Keenam, menyelenggarakan kegiatan akademik berbentuk webinar, salah satunya webinar *international series* yang rutin diselenggarakan dengan tema moderasi beragama; Ketujuh, memberikan wadah bagi organisasi kemasyarakatan Islam nasionalis dalam kerjasama dan selenggarakan berbagai kegiatan; Kedelapan, kluster penelitian khusus yang harus terdapat tema yang membahas moderasi beragama; Kuliah Kerja Nyata dengan tema moderasi beragama (wawancara ketua LPPM , Salatiga, 2021).

Kerjasama intens antara personal akademisi UIN Salatiga dengan Lembaga Percik dalam membuat berbagai kegiatan di antaranya: Pertama, kolaborasi penelitian IAIN Salatiga dengan Lembaga percik dengan tema penelitian: Peta keagamaan di Salatiga; Buku ajar tentang agama; pernikahan beda agama dari hukum agama dan hukum negara (wawancara, aktivis Percik, Salatiga, 2021).

Berikutnya adalah kasus yang terjadi di IAIN Manado. IAIN Manado memiliki distingsi sebagai kampus dengan perspektif multikultural. Sebagaimana dapat dilihat di situs IAIN Manado, bahwa visi lembaga yaitu, ” Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.” Sedangkan Misi IAIN Manado yaitu: Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang berkualitas berbasis masyarakat multibudaya di Indonesia; Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi; dan Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dilihat dari tujuannya IAIN Manado, yaitu: Pertama, Menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, mandiri, dan berguna di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, Menghasilkan karya penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat multikultural. Ketiga, Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, Meningkatkan mutu tata kelola pada seluruh aspek kelembagaan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Kelima, Meningkatkan peran institusi dalam memelihara khasanah budaya bangsa, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Di IAIN Manado, bentuk implementasi pendidikan multikultural dan program moderasi beragama adalah dengan memberikan ruang dialog akademis kepada para akademisi dari kalangan perguruan tinggi Kristen. Bentuk dialog-dialog akademis, dalam diskusi FGD dianggap sebagai media yang cukup efektif, namun kurang dioptimalkan secara sangat serius di antara perguruan tinggi yang berdasarkan keagamaan.

Sedangkan di IAIN Ambon, visi multikultural merupakan distingsi lembaga, sebagaimana dicantumkan dalam *website official* IAIN Ambon, dinyatakan: “Profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural”.

Sedangkan misi IAIN Ambon yaitu: Mencetak sarjana yang memiliki kemampuan keilmuan yang integral; Mencetak sarjana Muslim yang mampu memahami budaya dan mengaplikasikan teknologi secara integral; Menghasilkan kualitas penelitian yang unggul dan dipublikasikan pada level nasional dan internasional; Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis multikultural; dan Mewujudkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional, dan internasional.

Di IAIN Ambon, salah satu bentuk keseriusan menciptakan Ambon yang damai dan mewujudkan visi lembaga. Pengelola IAIN Ambon mengadakan sebuah mata kuliah “Pendidikan Multikultural”. IAIN Ambon merupakan kampus perguruan tinggi Islam di penelitian ini yang secara lugas menyatakan pentingnya multikulturalisme diinternalisasikan melalui mata kuliah Pendidikan Multikultural. Pengelola IAIN Ambon yang merumuskan Mata Kuliah Pendidikan Multikultural menilai, tanpa di internalisasi dan diinstitutionalisasi wacana multikulturalisme akan sulit dan bisa bias dalam menjalankannya. Mata Kuliah Multikulturalisme perlu dibunyikan secara jelas agar implementasinya pun akan lebih jelas.

Bentuk dari sikap terhadap multikulturalisme dan moderasi beragama. Di IAIN Ambon telah menerima mahasiswa dari non Muslim. Namun demikian mahasiswa non Muslim yang diterima adalah khusus untuk program studi umum, seperti jurnalistik. IAIN Ambon belum menerima mahasiswa non Muslim untuk program studi di bidang pengkajian Islam.

Dalam bentuk lainnya, artikulasi multikulturalisme dan moderasi beragama dapat dilihat dengan keterbukaan IAIN Ambon dalam memberi kesempatan dosen non Muslim untuk mengampu mata kuliah. Namun, mata kuliah yang diberikan pada mata kuliah khusus seperti yang ada di Fakultas Ushuluddin, misalnya Perbandingan agama. Pemberian kesempatan kepada dosen non Muslim untuk mengampu mata kuliah terkait Kristen dinilai akan dapat menyampaikan ajaran Kristen langsung dari perspektif *insider*. Sehingga mahasiswa tidak menerima materi yang bias ideologi dari dosen. Dengan cara ini diharapkan dialog yang sepenuh hati benar-benar terjadi.

3. Tantangan Pendidikan Multikultural dan Program Moderasi Beragama

Kementerian Agama telah mewajibkan setiap perguruan tinggi Islam negeri untuk memiliki sebuah lembaga yang mengkaji dan menerapkan moderasi beragama, yang kemudian disebut sebagai Rumah Moderasi. Namun dalam praktiknya keberadaan Rumah Moderasi tidak terlampaui aktif dalam berkegiatan selain aktivitas webinar yang marak di masa Pandemi Covid-19. Rumah Moderasi belum menampakkan kegiatan dan keterlibatan dalam gerakan dialog antar agama, sebagaimana ditemukan dalam empat perguruan tinggi Islam negeri yang menjadi subjek penelitian di buku ini.

Di UIN Raden Mas Said Solo keberadaan Rumah Moderasi hanya ada secara kelembagaan namun tidak menampakkan sebuah gerakan nyata yang mempromosikan aktivitas moderasi

beragama (TU, wawancara, Solo, 2021). Keberadaan Rumah Moderasi terdengar nama namun tidak pernah menampilkan aktivitas. Rumah Moderasi tidak dikelola secara serius.

Namun demikian informan penelitian yang merupakan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) mengatakan bahwa kegiatan moderasi beragama telah dilakukan kalangan mahasiswa dengan adanya program “Duta Moderasi” yang diambil di setiap kelas dan kemudian diberi pelatihan selama tiga hari.

Para duta moderasi yang telah dilatih kemudian menebarkan wacana moderasi Islam di kelas masing-masing. Setiap setelah Ujian Akhir Semester disebarkan kuesioner terkait sikap moderasi beragama mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bagaimana program moderasi beragama mempengaruhi pemikiran dan sikap mahasiswa.

Pihak kampus yang dipelopori oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah melakukan inisiatif dengan mendirikan “Taman Moderasi Beragama” di sekitar kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (Observasi, Solo, 2021). Di taman ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol, namun akan menjadi *melting pot* tempat pertemuan mahasiswa berdiskusi tentang multikulturalisme dan moderasi beragama.



Gambar 11. Taman Moderasi UIN Raden Mas Said Solo

Keberadaan Taman Moderasi di UIN Raden Mas Said Solo secara langsung dan tidak langsung telah dapat menjadi media internalisasi program moderasi beragama. Secara langsung, dengan keberadaan Taman Moderasi, mahasiswa bisa melakukan berbagai aktivitas di sekitar taman. Sedangkan secara tidak langsung, ketika mahasiswa berada di sekitar taman moderasi akan melihat keberadaannya yang mengingatkan kepada mahasiswa mengenai pentingnya bersikap moderat.

Di IAIN Salatiga keberadaan moderasi beragama tidak dikelola secara serius dan fokus karena lembaga moderasi beragama hanya dikelola dengan sistem rangkap jabatan. Pada kasus ini Ketua LPPM juga menjabat posisi yang mengelola moderasi beragama. Tidak terdapat struktur yang definitif, sehingga kegiatan terkait moderasi beragama atau yang berkenaan dengan isu multikultural tidak diselenggarakan secara sistematis dan terencana.

Di IAIN Manado lembaga moderasi beragama tidak nampak secara jelas dan memiliki aktivitas. Di IAIN Ambon moderasi beragama memiliki nama berbeda sebagai distingsi dengan keberadaan moderasi beragama di perguruan tinggi

lainnya. Lembaga ini sekaligus dijabat oleh Ketua LPM yang juga merupakan tokoh dan penggerak aktivitas perdamaian di Ambon.

Dari temuan penelitian ditemukan bahwa instruksi Menteri Agama mengenai kewajiban setiap PTKIN memiliki Rumah Moderasi tidak sepenuhnya dijalankan secara optimal. Bahkan, dalam bentuk kelembagaan resmi, masih belum optimal untuk mengelolanya secara serius dengan adanya sebuah lembaga yang fokus terhadap isu-isu moderasi beragama.

Dalam menjalankan pendidikan multikultural, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri menghadapi berbagai tantangan. Di UIN Raden Mas Said Solo pernah mengalami intimidasi ketika melakukan kegiatan bedah buku, "Islam Tuhan, Islam Manusia" karya Haidar Bagir. Kelompok Islamis di Solo mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika kegiatan yang pembicaranya dituduh mereka sebagai seorang tokoh Syi'ah tersebut terus berjalan.

Namun demikian kegiatan bedah buku tersebut terus berlangsung, tetapi dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang jumlahnya sekitar 1500 personil. Sementara aksi demonstrasi tetap berlangsung, dalam faktanya kelompok penolak aksi bedah buku tersebut hanya terdiri beberapa puluh orang saja. Penolakan juga muncul dari internal kampus, yang tidak setuju kehadiran Haidar Bagir yang sebenarnya juga warga Solo, namun dia dinilai akan menyebarkan Syi'ah (wawancara, Solo, 2021).

Kecurigaan terhadap Syi'ah dapat dilihat dari cerita yang disampaikan informan yang langsung mengalami pemboikotan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Dosen UIN Raden Mas Said, Isal (samaran) dituding sebagai penganut Syi'ah hanya karena ia pernah *posting* buku karya Quraish Shihab di media sosial Facebook (wawancara, Solo, 2021).

Ruang-ruang dialog juga mengalami persoalan di dalam kampus, ketika Fakultas Dakwah IAIN Solo melakukan inisiasi untuk mendirikan *Iranian Corner*. Reaksi keras bermunculan, intimidasi dialami oleh dekan fakultas dakwah yang diancam dengan orang yang mendatangnya dengan membawa pedang karena tidak setuju dengan gagasan *Iranian Corner* berdiri di kampus UIN Solo (MU, wawancara, Solo, 2021). Di UIN Raden Mas Said Solo juga pernah terjadi pemecatan seorang dosen pegawai negeri sipil karena terbukti sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dilarang oleh pemerintah.

Di Salatiga resistensi terhadap gerakan multikultural terjadi ketika akademisi IAIN Salatiga yang secara personal aktif berkolaborasi dengan Lembaga Percik Salatiga menerbitkan buku mengenai nikah beda agama (YU, wawancara, Salatiga 2021). Menurut aktivis Percik, buku tentang nikah beda agama disusun secara netral dan dalam perspektif hukum, tidak melakukan pemihakan terhadap salah satu agama.

Inisiatif penulisan buku terkait nikah beda agama karena banyak terjadi kasus pernikahan beda agama di Salatiga. Sehingga diperlukan sebuah tinjauan akademis, dan dalam perspektif Islam UIN Raden Mas Said dinilai dapat mewakili. Bahkan buku tentang nikah beda agama ini pernah dicetak sebanyak 1000 eksemplar dan beredar di internal UIN Raden Mas Said dan Universitas Kristen Satya Wacana sebagai bahan bacaan dan diskusi kalangan dosen dan mahasiswa (YU, wawancara, Salatiga 2021). Dasar hukum pernikahan beda agama didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tahun 1965 sub direktori pernikahan beda agama, bahwa pernikahan beda agama bisa dicatat dalam catatan sipil (YU, wawancara, Salatiga, 2021).

Informan dari Lembaga Percik menyatakan bahwa buku perspektif Islam dan hukum negara tersebut sangat penting keberadaanya di Salatiga, mengingat potensi nikah beda agama yang sangat tinggi dan bahkan sering terjadi. Kasus pernikahan beda

agama di Salatiga menurut informan Percik memunculkan pergumulan teologis. Maka untuk kasus Salatiga persoalan nikah beda agama sangat penting kontribusi dari kalangan akademisi UIN Salatiga. Oleh aktivis Percik, dalam membina kerukunan antar umat beragama, perlu diwacanakan konsep “Teologi Lokal” sebuah paradigma teologis yang mempertimbangkan aspek lokalitas dalam relasi beragama antar warga yang akan dapat memperkuat agenda kewargaan (MU, wawancara, Salatiga, 2021).

Walau secara kultural di Salatiga terdapat modal kultural yang baik, namun dalam konteks dialog akademis masih terdapat sikap saling curiga dan tertutup. Program-program pertemuan antar umat dijalankan yang di dalamnya terlibat para dosen UIN Salatiga secara personal dengan berbagai lembaga seperti Percik, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan dari kalangan agama lainnya (MU, wawancara, Salatiga, 2021).

Di Salatiga terdapat sebuah forum bernama “SOBAT”. Program SOBAT di antaranya mempertemukan beragam orang dari kelompok beda agama tinggal bersama di desa dengan komunitas agama yang berbeda, agar dapat melihat dan merasakan langsung berdampingan dengan orang yang berbeda agama namun bisa hidup harmonis dan perdamaian. Peserta juga diajak mengunjungi tempat ibadah dengan metode silang, yang beragama Islam mengunjungi gereja, sementara yang beragama Kristen mengunjungi mesjid, selain itu juga terdapat aktivitas membersihkan rumah ibadah

Di IAIN Ambon pada masa rektor dijabat oleh Hasboelah yang juga merupakan inisiator perjanjian Malino, gerakan tentang multikultural sangat intens, dan bahkan merupakan menjadi distingsi kampus, yang dapat dilihat dari visi multikultural IAIN Ambon. Namun saat ini sedang terjadi upaya untuk melakukan perubahan visi lembaga bukan lagi dengan distingsi multikultural, tetapi akan diarahkan dengan distingsi sains dan teknologi (Andi, wawancara, Ambon, 2021).

Andi (samaran) sangat menyayangkan rencana rektor saat ini (2021) untuk mengubah visi multikultural IAIN Ambon dengan argumentasi bahwa Ambon bukan hanya menjadi laboratorium perdamaian di Indonesia bahkan banyak pihak dari luar negeri ingin mempelajari bagaimana perdamaian di Ambon dapat diwujudkan.

Oleh sebab itu menurut Andi akan lebih baik jika IAIN Ambon tetap mempertahankan diferensiasi kelembagaan dengan kekhasan pendidikan multikultural, jika tetap dipaksakan dengan *core values* teknologi, dinilainya akan sangat sulit mengejar apa yang telah dilakukan oleh universitas lain di Indonesia (wawancara, Ambon, 2021).

Dalam membangun pendidikan multikultural di perguruan tinggi Islam, diperlukan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menjalin kerjasama antar perguruan tinggi, terutama bersama perguruan tinggi non keislaman. Pihak perguruan tinggi Islam belum secara optimal membangun *networking* antar perguruan tinggi yang berdasarkan keagamaan.

Di UIN Raden Mas Said Solo tidak ditemukan program yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang berbasis keagamaan (observasi dan wawancara, Solo 2021).

Sementara di IAIN Salatiga sebagai kota yang memiliki tingkat indeks toleransi tinggi tidak secara resmi menjalin kerjasama dengan adanya *Memorandum of Understanding* misalnya dengan Universitas Kristen Satya Wacana, yang merupakan salah satu kampus Kristen terbesar di Solo, dan memiliki nama yang baik dalam membangun multikulturalisme di Indonesia.

Dalam wawancara peneliti dengan Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana mengatakan bahwa pihak kampus UKSW secara kelembagaan tidak memiliki kesepakatan untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi Islam dalam sebuah isu seperti pendidikan multikultural. Jika terdapat persentuhan

akademis antara IAIN Salatiga dan UKSW itu terjadi lebih kepada personal masing-masing akademisi, bukan karena adanya kebijakan dari universitas.

Di Manado terdapat para akademisi non Muslim dari universitas Kristen yang memberi perkuliahan untuk program studi dan mata kuliah tertentu. Namun sebaliknya pihak kampus IAIN Manado tidak memberikan ruang kepada pihak akademisi non Muslim dari universitas Kristen untuk mengampu salah satu mata kuliah tertentu, seperti kristologi (wawancara, Manado, 2021). Temuan bahwa hanya salah satu pihak yang membuka diri ini mencerminkan masih adanya sikap saling curiga, sehingga terjadi dialog yang tidak produktif dalam aspek akademis.



Gambar 12. “Sekali Yesus Tetap Yesus” Ekspresi Beragama Umat Kristen di Manado

Di IAIN Ambon memang terjadi pertemuan akademis yang akan membuka ruang dialog di level masyarakat. Terdapat beberapa akademisi Kristen dari kampus Kristen yang mengajar di beberapa program studi terutama untuk mata kuliah tertentu seperti Kristologi. Begitu juga sebaliknya pihak dari kampus Kristen mengundang beberapa dosen IAIN Ambon untuk memberi kuliah atau diskusi ke kampus Kristen.

Kegiatan perkuliahan lintas agama yang terjadi di IAIN Ambon juga bukan karena adanya perjanjian kerjasama untuk melakukan dialog antar agama pada mata kuliah tertentu untuk saling kesepahaman dalam pandangan teologis.

Di IAIN Ambon, walaupun secara kelembagaan tidak terjadi kerjasama, namun para akademisi pegiat multikultural berupaya untuk tetap mempertemukan dosen non Muslim untuk dapat bersentuhan dengan mahasiswa Muslim untuk *sharing* pengetahuan dan pengalaman.

Di IAIN Ambon juga telah membuka diri untuk menerima mahasiswa yang beragama Kristen. Namun demikian pengelola kampus hanya memberikan ruang khusus di program studi tertentu, misalnya program studi jurnalistik. Pemilihan program studi jurnalistik karena materi-materi yang dipelajari bersifat umum.

B. Pembahasan

Pendidikan multikultural didasarkan pada prinsip: religiusitas, keadaban, dan modernitas (Ekawati,2019). Zarbaliyev (2017) mengemukakan bahwa jika keragaman suku, ras, dan budaya diatur oleh negara tidak diatur dengan sungguh-sungguh, maka akan menimbulkan masalah serius, bahkan konflik di berbagai bidang pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi terkait pendidikan multikultural sebenarnya memiliki arti praktis yang sangat luas untuk setiap negara budaya majemuk, terutama dalam mengelola konflik.

Konflik antarumat beragama biasanya dipengaruhi oleh sikap keagamaan yang eksklusif dan pertarungan antar masyarakat untuk mendapatkan dukungan dengan mengabaikan sikap toleransi. Upaya pencegahan disharmonisasi antar pemeluk agama perlu ditumbuhkan secara moderat, yaitu sikap inklusif atau terbuka sebagai pemeluk agama yang tidak berlebihan atau sikap irasional dalam menyikapi perbedaan. Islam moderat mendorong sikap toleransi, hormat dan percaya diri dalam realitas satu sama lain (Abdullah & Nento, 2021).

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia moderat, tidak bisa hanya dengan menyampaikan indahny toleransi dan keberagaman. Namun penting untuk menyampaikan mengenai apa adanya kondisi relasi antar pemeluk agama yang ada. Aktivis Percik di Salatiga mengatakan bahwa dalam sebuah antisipasi ataupun resolusi konflik, tidak perlu adanya upaya menutupi fakta dan persoalan-persoalan keragaman yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan persoalan-persoalan multikultural yang muncul tersebut dapat dirumuskan langkah strategis dan taktis untuk dapat menawarkan alternatif solusi. Karakter masyarakat Indonesia sangat terbuka untuk melakukan berbagai pertemuan dan dialog.

Zarbaliyef (2017) menjelaskan bahwa setiap masyarakat membentuk struktur nilai yang mencerminkan karakteristik etnis dan sejarah masyarakat. Dalam semua sistem nilai manusia dan masyarakat, nilai budaya memiliki posisi penting. Meskipun budaya yang berbeda, pandangan budaya tentang manusia, konsep hak dan kebebasan manusia juga berbeda, semua budaya harus mengikuti kriteria - perlindungan martabat, kebebasan manusia, dan keadilan. Nilai-nilai asing yang ditanamkan, standar budaya lain dalam pikiran seseorang memberikan dampak negatif pada hubungan masyarakat yang terbentuk secara historis, menghambat pembangunan yang stabil. Maka perlu intensitas yang tinggi untuk mengenalkan keragaman.

Gay (2003) mengemukakan pendidikan multikultural belum menjadi bagian sentral dari kurikulum yang secara teratur ditawarkan

kepada semua peserta didik. Dalam praktik, terdapat kendala dalam melaksanakan pendidikan multikultural yang terletak pada pendidik itu sendiri.

Bahkan para pendidik yang lebih menerima pendidikan multikultural tetap merasa skeptis tentang kelayakan implementasi pendidikan multikultural. Maka pendidikan multikultural dan moderasi beragama tidak cukup hanya tergantung pada pendidik. Namun perlu sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama. Seperti Taman Moderasi di UIN Raden Mas Said Solo, sebagai bentuk lain sarana belajar selain bahan bacaan.

Pengembangan pendidikan multikultural di pendidikan tinggi Islam membutuhkan dukungan ketersediaan literasi yang disediakan di perpustakaan ataupun media lainnya. Sehingga diskursus terkait multikultural dapat diakses sivitas akademika (Mustamin & Ulum, 2018). Kesadaran atas pentingnya menarasikan dan mempublikasikan pentingnya toleransi dan keberagaman diperlihatkan dalam gerakan yang intens dan masif seperti media online “Islam Santun” di UIN Raden Mas Said Solo.

Inisiatif para akademisi UIN Raden Mas Said dengan gerakan literasi Islam Santun perlu diperkuat dengan kebijakan pengelola perguruan tinggi Islam. Tanpa dukungan kebijakan, inisiatif pegiat multikultural dan moderasi akan bisa meredup dan bahkan hilang.

Dalam menjalankan agenda multikultural dan moderasi beragama, peran nilai-nilai lokalitas sangat membantu kesuksesan. Keberadaan kearifan nilai lokal sangat penting untuk diajarkan di perguruan tinggi Islam. Ekawati (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perspektif kearifan lokal Jawa yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi Islam merupakan pilar penting untuk melakukan deradikalisi.

Di UIN Raden as Said, IAIN Salatiga, IAIN Manado, dan IAIN Ambon pada dasarnya memiliki kearifan lokal yang menjadi cultural

capital sebagai media pertemuan dan dialog di ruang publik, yang di Amerika sering disebut sebagai *melting pot* (Susann, 2006; Maddern, 2013).

Konsep pendidikan model *melting pot* merupakan konsep pendidikan dimana masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun dengan menyadari perbedaan tersebut mereka dapat membina hidup bersama (Tilaar, 2004). Teori *melting pot* dapat dirancang dengan basis *bhineka tunggal ika*. Bentuk penanaman nilai keragaman tersebut dapat diupayakan dalam mata kuliah kewargaan, dan kemudian didukung dengan pendidikan agama (Komaruddin, 2014).

Trujalli (2016) menjelaskan penerapan *melting pot* tidak hanya berbentuk kurikulum, namun juga membutuhkan sara fisik. Metode *melting pot* membutuhkan sebuah interkoneksi, dimana terjadi kontak fisik, komunikasi, dialog antar berbagai budaya di sebuah titik di lembaga pendidikan. Metode *melting pot* yang diartikulasikan dengan sarana fisik akan lebih memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan peleburan sosial dan interaksi dari para peserta didik. Trujalli merekomendasikan sebuah lembaga pendidikan perlu merancang infrastruktur yang nyaman, segar, akses teknologi yang dapat mendukung terjadinya pertemuan lintas budaya dan hubungan kewargaan antar peserta didik.

Di Solo dan Salatiga, budaya Jawa yang harmonis merupakan kekuatan yang dapat menjadi perekat sosial. Di Ambon terdapat tradisi *pela gandong* yang sudah teruji sebagai media kultural mempertemukan umat Islam dan Umat Kristen dan menjadi media kultural dalam penyelesaian konflik Ambon, di Manado terdapat budaya dialog antar iman yang terjadi secara alamiah. Namun demikian penting untuk mempersiapkan sebuah sitem multikulturalisme dan moderat di perguruan tinggi.

Pengelola perguruan tinggi dapat melakukan gerakan anti radikalisme melalui beberapa cara di antaranya: pemilihan tenaga dosen secara selektif, pendidikan multikultural, memperkuat organisasi mahasiswa dan melakukan kaderisasi berbasis nasionalisme (Hasan, 2018). Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa perguruan tinggi Islam sangat memberi kontribusi terhadap pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama walau belum dalam bentuk yang optimal. Perguruan tinggi Islam memiliki peluang melakukan internalisasi dengan paradigma keilmuan yang sedang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam.

Pada kasus UIN Jakarta misi moderasi beragama menyatu dengan misi integrasi keilmuan. Moderasi beragama dinilai sebagai jembatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Armany Lubis, 2020). Pendekatan terintegrasi lebih banyak dipilih dalam internalisasi multikulturalisme dan moderasi beragama. Secara teoritik konsep ini dikenal sebagai *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi).

Kurikulum tersembunyi mengacu pada kurikulum yang tidak tertulis, pembelajaran sementara yang terjadi di luar pembelajaran formal, kurikulum yang diajarkan dan dapat secara penuh mempengaruhi pengembangan profesional peserta didik (Neve & Collett, 2018). Collet menjelaskan bahwa *hidden curriculum* dapat membuat peserta didik peduli, memahami, dan mendukung peserta didik bersikap kritis.

Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang tidak tampak dalam dokumen, tetapi dilakukan secara spontanitas, tidak direncanakan dan sudah menjadi budaya sekolah (Mustaghfiroh, 2014). Kurikulum tersembunyi adalah apa yang dipelajari peserta didik tetapi tidak ditulis secara jelas dalam program sekolah. Kurikulum tersembunyi dapat digunakan untuk internalisasi akhlak, nilai dan moral. Dalam implementasinya, kurikulum tersembunyi dapat berlangsung di dalam dan luar kelas. Kurikulum tersembunyi sangat mempengaruhi peserta didik (Hardoyo, 2008).

Kurikulum tersembunyi sangat efektif dalam menjalankan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan generasi muda. Melalui kurikulum tersembunyi, nilai-nilai, ideologi yang mengandung multikultural serta cinta dan kasih sayang akan berlangsung lebih baik dan efektif. Dalam kurikulum tersembunyi dibutuhkan teladan yang baik dari para guru terkait sikap memandang keragaman dan menumbuhkan nilai toleransi (Mustaqim, 2018). Isu multikulturalisme dan moderasi beragama membutuhkan kebijakan dari tokoh politik nasional, namun juga tergantung dengan kebijakan dari pimpinan sebuah perguruan tinggi.

Dari empat PTKIN yang dipelajari, secara *political will* pihak perguruan tinggi Islam menyadari pentingnya pendidikan multikultural dan moderasi beragama agar dapat membina toleransi dan perdamaian dan menjauhi masyarakat dari konflik sosial yang didasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Namun kesadaran terhadap hal tersebut tidak diiringi keseriusan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung.

Krishnamurti (2003) mengatakan perlu dukungan setiap elemen kampus dalam inisiatif multikultural di semua tingkat universitas. Karena luas dan dalamnya program kurikuler di lembaga pendidikan tinggi, inisiatif kurikuler multikultural sering kali disesuaikan dengan program atau lembaga tertentu.

Jika keragaman suku, ras, dan budaya diatur oleh negara, atau tidak diatur dengan sungguh-sungguh, akan menimbulkan masalah serius, bahkan konflik di berbagai bidang pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi sebenarnya dari keanekaragaman ini memiliki arti praktis yang sangat luas untuk setiap negara budaya majemuk (Zarbaliyev, 2017)

Dalam masyarakat multi etnis, multikulturalisme sebagai politik yang bertujuan untuk perlindungan dan pengembangan keragaman etnis, ras, agama dan budaya, menciptakan persyaratan yang sama untuk pengembangan nilai-nilai etnis-budaya mayoritas

dan etnis minoritas, menciptakan dasar bagi budaya yang berbeda, saling mempengaruhi (Zarbaliyev, 2017). Walau memiliki tujuan baik, namun bukan berarti pendidikan multikultural dan moderasi beragama terlepas dari kritik.

Banks (2020) mengkritik konsep pendidikan multikultural yang sering mengabaikan konsep dan isu penting yang berkaitan dengan viktimisasi dan penindasan kelompok etnis dan perjuangan mereka melawan rasisme dan kekuasaan. Isu-isu seperti rasisme, kemiskinan, dan penindasan cenderung dihindari dalam pendekatan kontribusi pada integrasi kurikulum.

Begitu banyak kendala dan tantangan dalam menjalankan program multikultural, sebagaimana dikemukakan oleh Banks (2020), membuat lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki nilai dasar multikulturalisme dan moderasi beragama memiliki peluang besar untuk menjalankan multikulturalisme, sebagaimana dimiliki oleh perguruan tinggi Islam.

Wenardjo (2021) menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pelaksanaan nilai-nilai agama memiliki potensi dalam mempromosikan multikulturalisme. Di tengah persoalan maraknya gerakan Islamisme, oleh Bruinessen (2013) disebut sebagai *Conservative Turn* atau kembalinya konservatisme Islam. Perguruan tinggi Islam berpeluang, karena memiliki modal sosial seperti mahasiswa dengan jejaring organisasi Islam ekstra kampus yang memiliki perspektif nasionalis.

Mujanni (2020) menjelaskan persoalan demokrat intoleran, yaitu sebuah pandangan kewargaan yang lebih memilih demokrasi dibanding sistem pemerintahan lain. Namun bersamaan dengan hal itu mereka tidak toleran secara politik. Toleransi politik yaitu sebuah sikap menerima dan mengakui hak politik siapa saja dengan latar perbedaan agama, keyakinan, kelompok sosial, bahkan dari kelompok ekstrim sekalipun. Persoalan ini menurut Mujani adalah konstitusi yang melegitimasi demokrasi namun di sisi lain tidak kuat

dan inklusif mengakomodir keberagaman berbagai kelompok yang berbeda (Haq, 2020).

Laporan PPIM dan CSRC UIN Jakarta tentang kecenderungan peningkatan radikalisme di lembaga pendidikan. Di kampus, ideologi radikal dan teroristik tidak bisa hanya dilawan dengan wacana dan tindakan represif. Salah satu cara yang dilakukan adalah kontra-ideologi melalui perspektif keagamaan dan keindonesiaan yang utuh. Cara yang bisa dilakukan selain pendidikan multikultural, misalnya dengan revitalisasi mata kuliah seperti, Pancasila, Pendidikan Kewargaan, serta revitalisasi organisasi mahasiswa ekstra kampus, seperti: HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, GMKI (Azra, 2018). Pendapat Azra ini sangat penting untuk dilaksanakan di perguruan tinggi Islam mengenai pemberian ruang yang luas bagi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Perguruan tinggi bukan hanya sebagai sumber pengetahuan tetapi juga sebagai pusat integritas dan peradaban (Wahid, 2020). Perguruan tinggi Islam sebagai wadah produksi sumber daya manusia yang profesional juga menjalankan peran sivilisasi. Merujuk Ubaedillah (2018) pendidikan kewargaan yang berlangsung di perguruan tinggi Islam telah berkontribusi terhadap penghargaan keberagaman Indonesia.

Jackson (2007) mengatakan bahwa pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah sukses mengembangkan pendidikan kewargaan, demokrasi, dan hak azazi manusia. Program pendidikan tinggi Islam yang berlangsung dengan memadukan konsep Barat dan ajaran-ajaran Islam menjadikannya sebagai katalisator agenda masyarakat sipil, demokrasi dan keberagaman. Yusuf (2020) we study the socio-economic covariates of individual-level religious intolerance in Indonesia, the largest Muslim democracy in the world. We use panel data from 2007 and 2014 of more than 20,000 adult individuals (representing 83% of the population menambahkan bahwa sumber daya manusia terdidik sangat penting untuk menciptakan individu yang lebih toleran.

Pendidikan multikultural di perguruan tinggi merupakan proses negosiasi generasi muda untuk menjadi dewasa dalam menyikapi keragaman yang dilihat mereka di diri orang lain. Proses pendidikan multikultural yang berlangsung di perguruan tinggi akan memberikan pemahaman terhadap keragaman dan bagaimana memaknai pengalaman hidup pada masa lampau, sekarang dan dalam bayang di masa mendatang (Koh & Harris, 2020).

Tugas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tidak hanya mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang keahlian masing-masing. Tugas yang tidak mudah dilaksanakan adalah bagaimana perguruan tinggi Islam negeri juga mempersiapkan profil alumni yang profesional namun memiliki sikap moderat, toleran di tengah masyarakat multikultural.

Pendidikan multikultural di perguruan tinggi bisa dimulai dari orientasi nilai-nilai religiusitas, dan menjadikan rasa peduli dan empati dalam budaya universitas (Wenardjo & Panggabean, 2021). Melalui pendidikan multikultural, sumber daya manusia perguruan tinggi Islam diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan penjaga keberagaman. Perguruan tinggi Islam negeri dinilai dapat menjadi agen dalam menjalankan pendidikan multikultural. Faktanya dalam observasi dan wawancara di lapangan perguruan tinggi Islam belum optimal menjalankan pendidikan multikultural. Perguruan tinggi Islam belum menjadi ruang publik akademik, tempat rendezvous dari komunitas lintas agama.

Hasan (2022) dengan menggunakan konsep ruang publik Habermas menjelaskan bahwa ruang publik sangat urgen dalam konstruksi nalar publik. Ruang publik menjadi pondasi terbangunnya partisipasi masyarakat. Mereka melakukan interaksi, melakukan berbagai tindakan, membuat negosiasi-negosiasi mengenai perbedaan dan konflik untuk sebuah konsensus. Dalam konsep ruang publik, setiap individu dan kelompok diberi ruang luas dalam menyampaikan nilai, aspirasi, dan perjuangan ideologis, selama dapat mematuhi kesepakatan semua untuk kepentingan bersama.

Perguruan tinggi juga merupakan sebuah ruang publik, dimana berbagai nilai dan ideologi bertemu dalam semangat akademis.

Pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam masih belum diselenggarakan secara serius dan belum memiliki strategi yang baik (Hifza, 2020). Saat ini di perguruan tinggi Islam masih terdapat sikap saling curiga. Sehingga terdapat kerjasama yang tidak intens antara perguruan tinggi Islam dengan perguruan tinggi Kristen atau perguruan tinggi yang didasarkan agama. Dalam pengamatan di lapangan terdapat kerjasama perguruan tinggi Islam negeri dengan perguruan tinggi non Islam. Namun minus didasarkan dari kebijakan resmi dari pimpinan dan pengelola perguruan tinggi Islam. Kerjasama lebih bersifat inisiatif dari para akademisi yang intens dengan isu multikultural, toleransi dan moderasi beragama. Sehingga persentuhan akademis dan dialog ilmiah belum secara sistematis dan masif dapat ditemukan. Pertemuan akademis di level akademisi perguruan tinggi Islam negeri sangat penting untuk membangun dialog sebagaimana yang diharapkan terjadi di level masyarakat. Sehingga kehidupan akademis di perguruan tinggi Islam dapat menjadi modal sosial dalam keberagaman.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa dalam membangun sumber daya manusia moderat, merupakan sebuah peran perguruan tinggi Islam dalam mengarusutamakan multikulturalisme dan moderasi beragama. Dalam implementasinya strategi yang dijalankan oleh perguruan tinggi Islam tidak hanya dalam bentuk kurikulum yang dijalankan di perguruan tinggi. Namun kegiatan lintas lembaga, dengan masyarakat, komunitas lintas iman, dan antar perguruan tinggi non keislaman juga sangat penting dilakukan.

Pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama juga dijalankan dengan kurikulum tersembunyi, tidak langsung secara jelas dalam bentuk mata kuliah. Namun dapat dijalankan dalam berbagai interaksi dan budaya damai yang dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi. Perjumpaan-perjumpaan publik sebagaimana ditawarkan Habermas juga dilakukan oleh perguruan tinggi Islam.

strategi-strategi simbolik juga menjadi media, sebagaimana yang dilakukan oleh UIN Raden Mas Said Solo dengan mendirikan Taman Moderasi yang menjadi titik temu kalangan mahasiswa.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang diuraikan di atas bahwa Perguruan Keagamaan Tinggi Islam Negeri memiliki peran penting dalam pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama. Salah satu strategi yang dilakukan dalam menciptakan sumber daya manusia moderat yaitu dengan pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural diberikan di perguruan tinggi Islam berupa mata kuliah Pendidikan Multikultural dan dengan melakukan insersi dan kurikulum tersembunyi terkait nilai-nilai multikultural dan moderasi beragama. Pendidikan multikultural diberikan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang toleran dan memiliki sikap moderasi beragama, yang kemudian menampilkan profil sarjana Islam yang profesional dan moderat.

Namun dalam praktik pengarusutamaan multikulturalisme dan moderasi beragama, perguruan tinggi Islam belum secara optimal dapat menjalankan pendidikan multikultural dan program moderasi beragama. Masih terdapat sikap eksklusivisme yang menghambat terjadinya dialog antar agama.

Selain itu dalam mengarusutamakan multikulturalisme dan moderasi beragama, perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri belum secara tegas memiliki kebijakan menjalankan pendidikan

multikultural dan implementasi program moderasi beragama. Juga masih minimnya jalinan kerjasama antar perguruan tinggi non Islam maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis isu multikultural.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan kesimpulan di atas. Maka dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan sumber daya manusia moderat dan pluralis di perguruan tinggi Islam, penulis merekomendasikan hal berikut.

Pertama, perlunya komitmen dan *political will* dari pengelola perguruan tinggi Islam mulai dari level kementerian sampai level pengelola perguruan tinggi Islam seperti program studi. Kedua, perlunya memperkuat komitmen untuk membangun pendidikan multikultural dan moderasi beragama yang dapat dicerminkan dalam visi, misi, dan program lembaga pendidikan tinggi Islam.

Ketiga, kurikulum pendidikan multikultural dan moderasi beragama perlu dijalankan dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Keempat, perlunya meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi lintas agama untuk meningkatkan kesalingpahaman dan kerjasama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti. (2020a). *Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaharuan, Ringkasan Eksekutif Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*.
- Abdul Mu'ti. (2020b). *Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaharuan, Ringkasan Eksekutif Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*.
- Abdullah, A. H., & Nento, S. (2021). Constructing Religious Moderation in Islamic Higher Education. *Al-Ulum*, 21(1), 166–186. <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.2084>
- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Pustaka Pelajar.
- Ameny-dixon, G. M. (2004). Than Ever : a Global Perspective. *Intellectual Scholarly Diversity Journal*, 8(1), 2.
- Amin Mudzakir, Idznursham Ismail, M. I. B. E. (2018). *Menghalau Ekstrimisme o Title*. Wahid Foundation.
- Anne Susann, B. (2006). Melting Pot or Tossed Salad? Implications for Designing Effective Multicultural Workgroups. *Management International Review*.
- Arifin, I., & Hermino, A. (2017). The Importance of Multicultural Education in Schools in the Era of ASEAN Economic Community. *Asian Social Science*, 13(4), 78. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n4p78>
- Armany Lubis. (2020). *Prinsip Moderasi Beragama dalam Rangka Penguatan Integrasi Nasional dan Perdamaian Dunia*. UIN Jakarta.

- Azyumardi Azra. (2018). Radikalisme dan Terorisme: Fenomena Global: Deradikalisasi dan Islam Wasathiyah untuk Pencegahan Semesta. In K. Azyumardi Azra, Noorhadi Hasan, Sri Yunanto, Din Wahid, Angel Damayanti (Ed.), *Deradikalisasi: Kontra Radikalisme dan Deideologisasi*. Kementerian Agama.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Routledge.
- Banks, J. A. (2020a). Approaches To Multicultural Curriculum Reform. *Race, Culture, and Education*, 3(3), 156–160. <https://doi.org/10.4324/9780203088586-28>
- Banks, J. A. (2020b). MULTICULTURAL EDUCATION: Development, dimensions, and challenges. In *Race, Culture, and Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203088586-27>
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2004). *Handbook of research on multicultural education*.
- Bruinessen, M. van. (2013). *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the “Conservative Turn.”* Institute of Southeast Asian Studies.
- Chalim, S. (2018). Pengaruh Misi, Kurikulum, dan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi Terhadap Perilaku Anti-Radikalisme Mahasiswa the Impact of University ' S Mission , Curriculum , and Leadership Toward Students ' View of Anti-Radicalism. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2013), 33–43. <https://media.neliti.com/media/publications/261678-none-924e1c10.pdf>
- Choi, J. (2010). Educating Citizens in a Multicultural Society: The Case of South Korea. *The Social Studies*, 101(4), 174–178. <https://doi.org/10.1080/00377990903284153>
- Citation, S. (2016). Designing the melting pot: Physical attributes of the intercultural campus. *Journal of Art for Life*, 8(1).
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications, Inc.
- Ekawati, E., Suparta, M., Sirin, K., Maftuhah, M., & Pifianti, A. (2019). Moderation of Higher Education Curriculum in Religious Deradicalization in Indonesia. *TARBIYA: Journal of Education in*

- Muslim Society*, 6(2). <https://doi.org/10.15408/tjems.v6i2.14886>
- Erbaugh, J. M., Rwambali, E., & Mkandawire, S. C. (2017). The contributions of human capacity development to improve University relevance: the iAGRI Model. *African Journal of Rural Development (AFJRD)*, 2(2(1978-2018-4423)), 473–482.
- Fong, A., & Sheets, R. H. (2004). Multicultural Education: Teacher Conceptualization and Approach to Implementation. *Multicultural Education*, 12(1), 10–15. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ781909&lang=es&site=ehost-live%0Ahttp://caddogap.com/periodicals.shtml>
- Fridiyanto, F. (2018). Polemik Konsep Islam Nusantara: Wacana Keagamaan dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2019. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 6(2).
- Fridiyanto, F. (2021). *KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA: Membangun Islam Moderat, Inklusif, dan Kebangsaan*.
- Fridiyanto, F., & Rafi'i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 25(1), 75–86.
- Fridiyanto, M. K. (2020). PERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI SEBAGAI LOKOMOTIF PERUBAHAN SOSIAL (Studi Visi Lembaga dan Paradigma Transintegrasi). *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 4(1).
- Garcia, Jesus and Pugh, Sharon, L. (2016). Multicultural Education in Teacher Preparation Programs A Political or an Educational Concept ? *Phi Delta Kappan International*, 74(3), 214–219.
- Gay, G. (2003). The Importance of Multicultural Education. *Educational Leadership*, 61(4), 30–35. <https://doi.org/10.2307/4451069>
- Gordon, G., & Whitchurch, C. (2007). Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce. *Higher Education Management and Policy*, 19(2), 131–153. <https://doi.org/10.1787/hemp-v19-art14-en>

- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2012). *Doing multicultural education for achievement and equity*. Routledge.
- H.A.R Tilaar. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Halualani, R. T., Chitgopekar, A., Morrison, J. H. T. A., & Dodge, P. S. W. (2004). Who's interacting? And what are they talking about? - Intercultural contact and interaction among multicultural university students. *International Journal of Intercultural Relations*, 28(5), 353–372. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2004.08.004>
- Haq, F. R. U. (2020, September). *Mewarisi Kecendikiawanan Malik Fadjar dan Jakob Oetama*.
- Hardoyo, H. (2008). Kurikulum Tersembunyi Pondok Modern Darussalam Gontor. *At-Ta'dib*.
- Hasan, N. (2022). Teologi Publik, Gus Dur, dan Moderasi Beragama. *Media Indonesia*.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital : Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Religious Moderation in The Digital Space : Case Study of Mainstreaming Religious Moderation among Islamic Higher Education Institut. *Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://jurnalbimaislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/182/142/739>
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1), 158–170. <https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.799>
- Huerta, G. C. (1999). Barriers to the implementation of multicultural education in a secondary teacher preparation program. *The High School Journal*, 82(3), 150–164. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS%7B&%7DPAGE=reference%7B&%7DD=psyc3%7B&%7DNEWS=N%7B&%7DAN=1999-03057-002>
- Institute, I. R. (2018). *Violent Extremism in Indonesia: Radicalism, Intolerance and Elections a Project From the International Republican Institute*. http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-17_indonesia_vea_report.pdf

- Jackson, E. (2007). Crafting a New Democracy: Civic education in Indonesian Islamic universities. *Asia Pacific Journal of Education*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/02188790601142892>
- John W. Creswell. (2012a). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Pearson Education.
- John W. Creswell. (2012b). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.
- Jubba, H., Awang, J., & Sungkilang, S. A. (2021). The Challenges of Islamic Organizations in Promoting Moderation in Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6(1), 43–54. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.12948>
- Karjalainen, H., & Karjalainen, H. (2021). *solved by an organisational culture ?*
- Koh, S. Y., & Harris, A. (2020). Multicultural reflexivity: university students negotiating ‘pockets’ and ‘strings’ of multiculturalism in Malaysia. *Children’s Geographies*, 18(6). <https://doi.org/10.1080/14733285.2020.1713300>
- Komaruddin Ks. (2014). Pendekatan Relegius dalam Pendekatan Multikulturalisme. *Edunomic*, 2(2).
- Kompas. (2018, November 20). BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal. *Kompas*.
- Krishnamurthi, M. (2003). Assessing multicultural initiatives in higher education institutions. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 28(3), 263–277. <https://doi.org/10.1080/0260293032000059621>
- Lawyer, G. (2018). The dangers of separating social justice from multicultural education: Applications in higher education. *International Journal of Multicultural Education*, 20(1). <https://doi.org/10.18251/ijme.v20i1.1538>
- LESLIE, P. G. R. A., BATTLE, R. W. W. E., & VOLD. (2003). *MULTICULTURAL EDUCATION: A SOURCE BOOK*. RoutledgeFalmer.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah*. PT Mizan Publika.

- Maddern, S. W. (2013). Melting pot theory. *The Encyclopedia of Global Human Migration*, 359–362. <https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm359>
- Mahyuddin032, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 103–124.
- Manning, K., & Coleman-boatwright, P. (2000). *Manning_Boatwright-Multicultural_Univ1*. 32(July 1991), 367–374.
- Muhammad, A. (2021). *Korespondensi-Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta*.
- Mustaghfiroh, H. (2014). Hidden Curriculum Dalam Pembelajaran Pai. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 147–162. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v9i1.769>
- Mustamin, A. A. Bin, & Ulum, B. (2018). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENGEMBANGAN LITERASI INFORMASI DI PERGURUAN TINGGI. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.29300/attalim.v17i1.1176>
- Mustaqim, M. (2018). Konsep Pendidikan Good Netizen Melalui Kurikulum Tersembunyi. *Jurnal Perspektif*. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i1.15>
- Naim, N. (2017). *Pendidikan multikultural, konsep dan aplikasi* (Vol. 1). Ar-Ruzz Media.
- Neve, H., & Collett, T. (2018). Empowering students with the hidden curriculum. *Clinical Teacher*. <https://doi.org/10.1111/tct.12736>
- Nguyen, T. L. H. (2016). Building human resources management capacity for university research: The case at four leading Vietnamese universities. *Higher Education*, 71(2), 231–251. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9898-2>
- Nirwana, N., Muhlis, M., Mustafa, S., & Ningsih, D. A. (2021). *Integrating Religious Moderation Value through Learning Process in Islamic Higher Education (An Analysis to the Lecturer's Perspective)*. December. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311605>

- Noorhaidi Hasan. (2018). Counter Violent Extremism (CVE) in the Frontline” Sinergi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. In K. Azyumardi Azra, Noorhadi Hasan, Sri Yunanto, Din Wahid, Angel Damayanti (Ed.), *Deradikalisasi: Kontra Radikalisme dan Deideologisasi*. Kementerian Agama.
- Parihala, Y., Samson, R. A., & Tika Lestari, D. (2019). *The Education of “Orang Basudara”: The Development of Multicultural Education in the Higher Education of Maluku Indonesian Christian University and Its Contribution to Maintain Peace in Maluku*. 187(Icrpc 2018), 26–29. <https://doi.org/10.2991/icrpc-18.2019.6>
- Penyusun, T. (2013). Moderasi Beragama. In *Kementerian Agama* (Vol. 53, Issue 9).
- Pewewardy, C., & Frey, B. (2002). Surveying the landscape: Perceptions of multicultural support services and racial climate at a predominantly White university. *Journal of Negro Education*, 71(1), 77–95. <https://www.jstor.org/stable/3211226>
<http://www.jstor.org/stable/10.2307/3211226>
- Popov, V., Brinkman, D., Biemans, H. J. A., Mulder, M., Kuznetsov, A., & Noroozi, O. (2012). Multicultural student group work in higher education. An explorative case study on challenges as perceived by students. *International Journal of Intercultural Relations*, 36(2), 302–317. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.09.004>
- Quraish Shihab. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur’an. Jilid I*. Lentera Hati.
- Rule, P., & John, V. M. (2015). A Necessary Dialogue. *International Journal of Qualitative Methods*, 14(4), 160940691561157. <https://doi.org/10.1177/1609406915611575>
- Saefulloh, A. (2019). The Integration of Islamic Education Value in Strengthening Higher Education Students’ Peace-loving Character. *ICIE (International Conference on Islamic Education)*, 16(2), 134–140. <https://ocs.uinib.ac.id/conference/index.php/icie/icie2019/paper/viewPaper/27>
- Sarastiani, A. (2020, September). *Membentuk Wawasan Kebangsaan*.
- Sediadi Tamtanus Agus. (2018). *Pemikiran: Menetralsir Radikalisme Di Perguruan Tinggi Melalui Para Dosen (Studi Kasus Diklat*

- Prajabatan Golongan III – Tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). *Ucej*, 3(2), 206–223.
- SHOLEHUDDIN, M. S., Rofiqotul, A., ATQIA, W., TAUFIQ, A., Moh Nurul, H., & Heni Lilia, D. (n.d.). *TRANSFORMATION-THE STATE ISLAMIC INSTITUTE BECOMES A STATE ISLAMIC UNIVERSITY: INSIGHT FROM RELIGIOUS MODERATION AND SCIENCE HARMONIZATION*.
- Sleeter, C. (2018). Multicultural education past, present, and future: Struggles for dialog and power-sharing. *International Journal of Multicultural Education*, 20(1). <https://doi.org/10.18251/ijme.v20i1.1663>
- Sulhan, M., Hasbiyallah, H., & Haq, D. N. (2018). *Prophetic Bases of Islamic Moderation of State Islamic Higher Education (PTKIN)*. 261(Icie), 52–57. <https://doi.org/10.2991/icie-18.2018.10>
- Suradi, A. (2018). The Challenges of Education Based on Multicultural in National Local Culture Conservation in Globalization Era. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v16i1.1156>
- Syakur, A., Bakri, M., & Ghony, H. M. D. (2021). Multicultural Islamic Education Genealogy at Al-Hikam Student Islamic Boarding School of Malang. ... *Critics Institute (BIRCI-Journal)* <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2180>
- Tolchah, M., & Mu'ammam, M. A. (2019). Islamic education in the globalization era; challenges, opportunities, and contribution of islamic education in indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4). <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74141>
- Ubaedillah, A. (2018). Civic Education for Muslim Students in the Era of Democracy: Lessons Learned from Indonesia. *Review of Faith and International Affairs*, 16(2). <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1469837>
- Wahid, A. H., Mundiri, A., Najiburrahman, Baharun, H., & Muali, C. (2020). Anti radicalism education; amplification of islamic thought and revitalization of the higher education in indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, August*.

- Wenardjo, E., & Panggabean, H. (2021). Influence of Caring and Empathy on Students' Multiculturalism Mediated by Christianity: Role of University Core Values. *Psychological Research on Urban Society*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/proust.v4i1.120>
- Widiasari, N. (2018). Religious Intolerance in Indonesia: JPNN 's Coverage of the Bogor Case . *Asian Politics & Policy*, 10(1), 145–149. <https://doi.org/10.1111/aspp.12375>
- Widyowati, A. (2016). THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITY IN PREPARING HUMAN RESOURCES IN THE GLOBALIZATION ERA. *HUMAN RESOURCE IMPROVEMENT*.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research : design and methods* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Yusuf, A. A., Shidiq, A. R., & Hariyadi, H. (2020). On socio-economic predictors of religious intolerance: evidence from a large-scale longitudinal survey in the largest muslim democracy. *Religions*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/rel11010021>
- Yusupova, G. F., Podgorecki, J., & Markova, N. G. (2015). Educating young people in multicultural educational environment of higher education institution. *International Journal of Environmental and Science Education*, 10(4), 561–570. <https://doi.org/10.12973/ijese.2015.270a>
- Zarbaliyev, H. (2017). Multiculturalism in globalization era: History and challenge for Indonesia. *International Journal of Scientific Studies*, 13(1), 1–16.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

As'ad lahir di Sarolangun pada tanggal 12 Maret 1969. Menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Asad Isma pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Kopertais Wilayah XIII Jambi 2015-2019, Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi, Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jambi, Direktur CEPP Jambi Link Universitas Indonesia. Beberapa karya tulisnya: 1) *the Effect of Visionary Leadership, Organizational Behavior, Persuasive Communication and Organizational Commitment on the Professionalism of Honorary Employees* (Journal of Educational Review 5(1), 2018; 2) *Street Children Religious Education: a Study on Car Window Cleaning Kids in Jambi* (Al-Ta'lim Journal 25 (3), 2018; 3) *Linking Open Acces Movement to the Indonesia Islamic Higher Education, 3rd Asian Education Symposium* (AES 2018); 4) Pengembangan Keilmuan Program Studi Jurnalistik Islam melalui Mata Kuliah Peace Journalism (Jurnal Dakwah Risalah 30 (1), 2019; 5) Pergeseran Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Jambi Seberang (Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20 (1), 2005; 6) Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Seberang Kota Jambi: Satu Tinjauan Ulang *Social Role of Tuan Guru in the People of Seberang* (Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, 34 (2), 2017.

Fridiyanto lahir tanggal 19 Juni 1981 di Muara Bungo-Jambi. Tahun 2000-2004 studi di Program Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tabiyah IAIN STS Jambi. Ia menyelesaikan pendidikan Magister bidang Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN STS Jambi. Tahun 2018, Fridiyanto menyelesaikan pendidikan Doktor Manajemen Pendidikan di Pascasarjana UIN Maliki Malang.

Saat ini Fridiyanto merupakan dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian dan Penerapan Transintegrasi Ilmu. Fridiyanto dari tahun 2009-2020 menjadi tenaga pendidik di UIN Sumatera Utara, dan pernah mengajar di: Fakultas Bahasa Universitas Muara Bungo (2008-2009); Akademi Sekretaris Manajemen Jambi (2007-2009); IAIN STS Jambi (2004-2009); Akademi Bahasa Asing Jambi (2007-2009); dan Universitas Terbuka (2007-2009).

Karyatulis Fridiyanto dapat dilihat di akun Google Scholar Fridiyanto.

Fridiyanto pernah mengikuti kegiatan Dialog antar Agama di Program Young Moslem Leader Exchange Program di Australia di tahun 2007. Pada tahun 2012, Fridiyanto selama tiga bulan mengikuti program Research Assistance di Belanda. Tahun 2017 ia mempresentasikan tema disertasinya di Malaysia, Singapore dan Thailand. Fridiyanto juga aktif di organisasi kemasyarakatan: Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Wilayah Sumatera Utara, Pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Wilayah Sumatera Utara.

M. Husnul Abid, MA adalah dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA MODERAT

Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengarusutamaan
Multikulturalisme dan Moderasi Beragama

Indonesia saat ini mengalami persoalan segregasi sosial, tindakan intoleran dan kekerasan yang didasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui proses pendidikan dengan berbagai strategi misalnya dengan kurikulum pendidikan multikultural dan program moderasi beragama.

Perguruan tinggi Islam memiliki peran penting dalam melakukan persenyawaan sosial di antara keragaman budaya dan perbedaan agama. Di perguruan tinggi Islam mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang telah didik dan dilatih sebagai profesional dalam bidang keahliannya di sisi yang lain juga dibekali terhadap pemahaman keislaman yang moderat, dan menyadari realitas keragaman. Sehingga kontribusi perguruan tinggi Islam sanagat jelas dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang moderat.

Dalam buku ini penulis mengemukakan berbagai persoalan, tantangan, kendala, dan peluang perguruan tinggi Islam dalam kerja panjang dalam mengarusutamakan multikulturalisme dan program moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah. Buku ini sangat penting dibaca oleh kalangan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam, serta perlu dibaca para pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk dapat memahami bagaimana perguruan tinggi Islam harus didukung dalam mengarusutamakan pendidikan multikultural dan moderasi beragama.



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

ISBN 978-625-329-630-4



9 786233 296304